



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHUN ANGGARAN 2022**



KATA PENGANTAR

Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.

**Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji dan Syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan hidayahNya sehingga

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja DJKI pada Tahun Anggaran 2022.

Laporan Kinerja sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas seluruh kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Tahun Anggaran 2022 guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, Target Kinerja serta pencapaian dalam Rencana Strategis DJKI (2020-2024) pada khususnya periode pelaksanaan Tahun Anggaran 2022.

Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2022 DJKI telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020-2024 serta guna mengakselerasi perwujudan misi yang diemban DJKI dalam mencapai visi yang diharapkan.

Perjanjian Kinerja, Target Kinerja serta Program Unggulan (16 Program Unggulan) menjadi *concern* dan sekaligus arah kebijakan DJKI dalam mengakselerasi pencapaian target, tuisi, dan program Kekayaan Intelektual terutama dalam kapasitas DJKI sebagai otoritas Kementerian/Lembaga yang berwenang dalam pengadministrasian Kekayaan Intelektual nasional.

Laporan Kinerja ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis DJKI, sekaligus sebagai bahan *self assessment* atas kinerja DJKI Tahun 2022 yang dapat digunakan oleh internal untuk melakukan peningkatan kinerja yang berkelanjutan dari setiap unit yang ada di lingkungan DJKI. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan akan mendatangkan masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dalam semangat Reformasi Birokrasi.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah berkontribusi mewujudkan target kinerja, program unggulan serta penyelenggaraan pembinaan Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2022, tetapkan nyalakan semangat untuk selalu memberikan peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja yang lebih baik.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thariq,

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dr. Sucipto, S.H., M.H., M.Kn.

**Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan target kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Laporan Kinerja DJKI tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akuntabilitas dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah seperti:

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menkumham tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kemenkumham Tahun 2021-2024.

Pada tahun 2022 DJKI menerima sebanyak 257.335 permohonan KI (baik KI Konvensional dan KI Komunal) jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 26,41% jika dibandingkan tahun 2021. Selanjutnya DJKI pada tahun 2022 berhasil menyelesaikan penyelesaian permohonan KI sebanyak 296.904 permohonan (mengalami peningkatan sebesar 15,09% jika dibandingkan tahun sebelumnya).

Selama tahun 2022 telah terlaksana penyerapan anggaran sebesar Rp 485.987.311.076,00 (atau sekitar 83,43%) dari alokasi DIPA anggaran Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual tahun anggaran 2022 yaitu sejumlah Rp 582.450.099.000,00. Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan persentase capaian penyerapan anggaran di tahun 2021 (81,79%).

Adapun realisasi penerimaan PNBPNP atas layanan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh DJKI kepada masyarakat pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 805.681.673.387,00 atau sekitar 94,78% dari target PNBPNP delapan ratus lima puluh miliar rupiah).

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2022 serta dapat menjadi gambaran bagi perbaikan kinerja pada tahun berjalan maupun di tahun kerja berikutnya.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thariq, Ihdinash shiratal mustaqim..

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Maksud dan Tujuan.....	9
D. Aspek Strategis	10
E. Isu Strategis.....	13
F. Sistematika Laporan.....	15
BAB II.....	19
PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024.....	19
B. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2022.....	23
BAB III	31
AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022.....	31
B. Realisasi Anggaran	77
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	80
D. Capaian Kinerja Lainnya	83
BAB IV	106
PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	109
LAMPIRAN.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akuntabilitas dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah seperti:

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menkumham tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kemenkumham Tahun 2021-2024 yang menitikberatkan pada lembar kerja evaluasi (berdasarkan sistem elektronik).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 pada dasarnya dilator belakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dituntut selalu melakukan pembenahan dan capaian kinerja selama di tahun anggaran 2022. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kedepannya sekaligus alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja DJKI kedepannya serta diharapkan. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi serta bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKI menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan,

- penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
 - e) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; serta
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

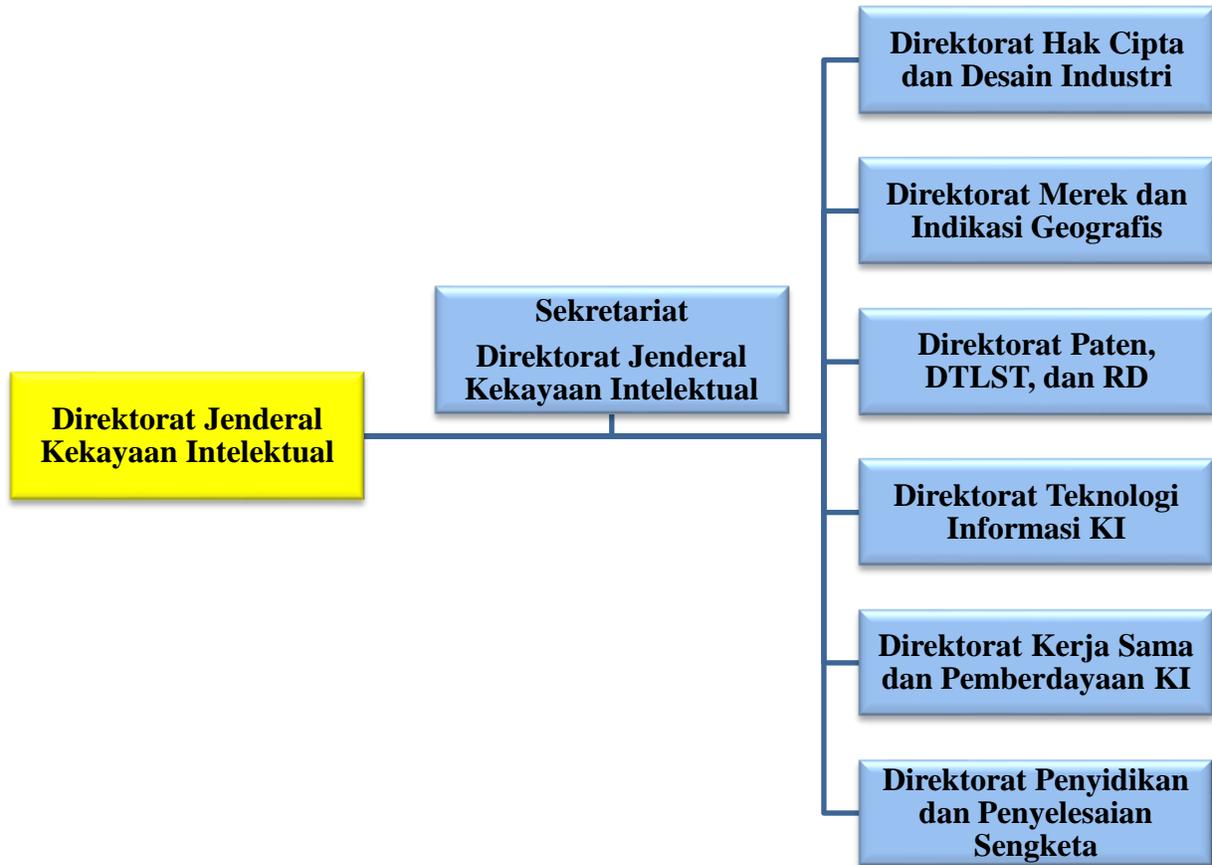
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut DJKI mengelola/mengadministrasikan seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual sebagai dasar hukum, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Desain Industri;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- b. Direktorat Cipta dan Desain
- c. Direktorat Merek dan Indikasi Geografi
- d. Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang
- e. Direktorat Teknologi dan Informasi KI
- f. Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan KI
- g. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

**Bagan Struktur Organisasi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**



Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki 7 Unit Eselon II yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tugas :

Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan DJKI.

Fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;

- c. Fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi;
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan DJKI;
- e. Pembinaan dan pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. Pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan;
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha; hubungan masyarakat, persuratan dan perjalanan dinas.

2) Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait dan desain industri.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi cakram optik dan pengawasan lembaga manajemen kolektif;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.

3) Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi dan penelusuran paten, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
- c. Pelaksanaan fasilitasi komisi banding paten;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang; dan
- f. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

4) Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografi serta fasilitasi Komisi Banding Merek.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan Indikasi Geografis;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan Indikasi Geografis;
- c. Pelaksanaan fasilitasi Komisi Banding Merek;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan Indikasi Geografis;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis; dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

5) Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang kekayaan intelektual;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang kekayaan intelektual;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan potensi kekayaan intelektual, diseminasi dan promosi, penyiapan media diseminasi dan promosi, inventarisasi kekayaan intelektual komunal serta pengelolaan perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.

6) Direktorat Teknologi Informasi KI

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, pemberian layanan bantuan *call center*, pelayanan data dan informasi Kekayaan Intelektual serta dukungan infrastruktur teknologi informasi di bidang Kekayaan Intelektual.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi Kekayaan Intelektual;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
- c. Pelaksanaan standarisasi dan proses kerja di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
- d. Pelaksanaan pengembangan portal web dan surat elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- e. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pemeliharaan database, serta pemantauan keamanan aplikasi dan data Kekayaan Intelektual;
- f. Pelaksanaan pemberian layanan bantuan call center dan dukungan infrastruktur teknologi informasi kekayaan intelektual serta pengelolaan dan pemantauan sistem jaringan;
- g. Pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi Kekayaan Intelektual; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual.

7) Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, di bidang penyidikan, pencegahan, penyelesaian sengketa dan evaluasi tindak pidana Kekayaan Intelektual.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi penerimaan pengaduan dan penyusunan data, administrasi penyidikan, penghimpunan dan dokumentasi berkas perkara tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyidikan, pemberkasan, pemantauan dan evaluasi penyidikan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual;
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual serta perumusan, pelaksanaan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa secara alternatif; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan target kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Laporan Kinerja DJKI tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akuntabilitas dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah seperti:

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menkumham tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kemenkumham Tahun 2021-2024.

Laporan Kinerja sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas seluruh kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Tahun Anggaran 2022 guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, Target Kinerja serta pencapaian dalam Rencana Strategis DJKI (2020-2024) pada khususnya periode pelaksanaan Tahun Anggaran 2022.

Laporan Kinerja menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis DJKI, sekaligus sebagai bahan *self assessment* atas kinerja DJKI Tahun 2022 yang dapat digunakan oleh internal untuk melakukan peningkatan kinerja yang berkelanjutan dari setiap unit yang ada di lingkungan DJKI. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan akan mendatangkan masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dalam implementasi semangat Reformasi Birokrasi.

D. Aspek Strategis

Dalam era digitalisasi yang telah memasuki era Industry 4.0 dan persiapan menghadapi era Industry 5.0, aspek Kekayaan Intelektual (KI) menjadi sangat penting karena hampir seluruh elemen yang mendukung era ini adalah produk-produk yang berbasis KI. Sistem perdagangan menjadi global tanpa batas tempat dan waktu (*anywhere* dan *anytime*). Permasalahan KI menjadi lebih kompleks tidak hanya terkait dengan masalah pelindungannya, namun juga bagaimana dampak perlindungan hak KI tersebut terhadap aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya. Dengan demikian sistem perlindungan hak KI juga harus sejalan dengan perubahan, tantangan dan peluang yang harus dihadapi.

Berangkat dari problematika dan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan strategi kebijakan untuk dapat menopang agar Kekayaan Intelektual dapat terus tumbuh menjadi pilar penting pembangunan dan ekonomi nasional yaitu melalui 4 (empat) pilar yang kesemuanya tersebut saling kait mengkait dan berkesinambungan dalam mewujudkan KI yang dapat memberikan perlindungan bagi pemilik KI pada khususnya dan memberikan *competitive advantage* bagi bangsa Indonesia, yaitu:

- 1) Penciptaan karya intelektual;
- 2) Perolehan/perlindungan KI;
- 3) Penegakkan Hukum; serta

4) Komersialisasi KI.

Keempat pilar tersebut sangat terkait erat dengan urgensi perlindungan KI. Keempat pilar Kekayaan Intelektual tersebut juga sangat terkait erat dengan Ekosistem Kekayaan Intelektual. Pada dasarnya Ekosistem KI merupakan siklus perputaran ekonomi yang terdiri dari elemen kreasi, proteksi, dan utilisasi KI yang digerakkan oleh inovasi dan kreativitas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Elemen Kreasi merupakan bahan bakar dari Ekosistem KI yang berperan dalam menghasilkan kreasi kekayaan intelektual yang kreatif dan inovatif. Elemen Proteksi merupakan minyak pelumas atau oli dari Ekosistem KI yang berperan memperlancar proses perlindungan terhadap inovasi dan kreativitas melalui perolehan, penegakan hak dan pengelolaan KI. Selanjutnya, elemen Utilisasi merupakan mesin dari Ekosistem KI yang berperan dalam memproduksi dan memasarkan produk KI. Keberhasilan dalam Utilisasi akan mendorong pengembangan dan penghasilan kreasi KI yang baru. Siklus Ekosistem KI, baik KI yang bersifat Peronal yaitu KI Industri seperti: Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang maupun KI yang bersifat Komunal seperti Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional dan Sumber Daya Genetik) ini akan terus berputar secara berkesinambungan, dan dampaknya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ekosistem KI mulai dari elemen kreasi (penciptaan karya intelektual), proteksi (perolehan dan perlindungan HKI serta penegakkan hukum), dan utilisasi (komersialisasi KI) harus mampu bersinergi sehingga mampu menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi yang berkembang sangat cepat.

Terkait dengan keempat elemen tersebut, peranan DJKI berada di keempat elemen tersebut mulai dari elemen kreasi hingga elemen utilisasi. Terkait peranan dalam elemen proteksi misalnya melalui keberadaan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI yang memiliki tugas dalam mendiseminasikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atau stakeholder terkait agar terbentuk pemahaman sehingga mendorong masyarakat mengajukan perlindungan atas KI yang dihasilkannya. Lalu berkaitan dengan peranan dalam elemen proteksi, setidaknya ada 2 (dua) hal yang terkait dengan proses bisnis DJKI, yaitu:

- 1) Elemen proteksi dalam hal pemberian kepastian hukum atas pengajuan permohonan pendaftaran atau pencatatan KI yang diajukan: melalui keberadaan direktorat teknis yang ada di DJKI seperti Direktorat Merek&Indikasi Geografis, Direktorat Hak Cipta&Desain

Industri, Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang dalam memberikan kepastian hukum berupa pemberian persetujuan/grant atas pengajuan permohonan pendaftaran atau pencatatan KI yang diajukan oleh pemohon KI; ataupun

- 2) Elemen proteksi yang terkait dengan proses penegakkan hukum yaitu melalui keberadaan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dalam hal terjadi pelanggaran HKI atas KI yang telah didaftarkan/dicatatkan).

Selanjutnya terkait elemen utilisasi juga menjadi fokus DJKI dalam memberdayakan KI yang telah didaftarkan/dicatatkan melalui keberadaan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI dalam memberikan pendampingan kepada pemohon dan pihak terkait dengan produk KI yang sudah dilindungi agar dapat memiliki nilai tambah atau dapat ‘meleverage’ potensi ekonomi yang dimiliki dari produk KI yang telah didaftarkan/dicatatkan.

Sehingga strategi nasional KI yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah dan privat baik di pusat maupun di daerah sangat diperlukan agar sistem KI nasional secara optimal dapat mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional. Namun kesemua hal tersebut akan menjadi percuma jika tidak ada jaminan legalitas yaitu dalam bentuk perlindungan hukum melalui pendaftaran atau pencatatan atas Kekayaan Intelektual yang dapat diajukan kepada negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Keberadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki peran strategis tidak hanya secara internal dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tetapi juga dalam ekosistem Kekayaan Intelektual nasional. DJKI berperan sebagai administrator sekaligus regulator dalam memberikan Perlindungan KI Nasional mengupayakan kebijakan yang concern kepada perlindungan dan pemanfaatan KI yang dapat menjadi fondasi ekonomi digital (*new economic era*) serta memiliki *Competitive Advantage* sekaligus Pendorong dan Pemulih Perekonomian Nasional, baik melalui perlindungan dan pemanfaatan KI Personal maupun KI Komunal sehingga terwujud visi Presiden Jokowi Indonesia Menjadi Negara terbesar dalam Ekonomi Digital Era yang berkemandirian dan berkepribadian.

Disinilah peran atau aspek strategis DJKI menjadi penting khususnya dalam kapasitas DJKI sebagai sebagai kantor Kekayaan Intelektual di Indonesia sekaligus satu-satunya pihak yang memiliki otoritas dalam mengadministrasikan sistem KI sekaligus memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual nasional.

E. Isu Strategis

Setiap tahunnya DJKI memiliki Tahun Tematik (dari masing-masing rezim KI) yang ditentukan berdasarkan tren atau kondisi yang signifikan terjadi pada tahun bersangkutan. Penentuan tahun tematik tersebut juga dapat dikatakan sebagai isu strategis bagi DJKI dalam rangka mengakselerasi pencapaian target dan tujuan DJKI. Misalnya pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menetapkan tahun 2022 sebagai Tahun Tematik Hak Cipta dengan beberapa inovasi seperti: Persetujuan Otomatis Pencatatan (POP) Hak Cipta, dimana capaian dari POP Hak Cipta mencapai 107.829 pencatatan hak cipta atau melampaui target sebesar 100.000 pencatatan, dan dari capaian tersebut telah berkontribusi bagi PNBP DJKI sebesar Rp 31.817.100.000,00.

DJKI menentukan bahwa pada tahun 2022 terdapat 16 Program Unggulan dimana salah satunya terkait dengan rezim Hak Cipta sebagai tahun tematik. sebagai Tahun Hak Cipta sedangkan pada tahun 2023 ditetapkan sebagai tahun tematik bagi Merek dengan Program Unggulannya berupa ‘One Village One Brand’. Setidaknya terdapat beberapa hal yang potensial ataupun telah menjadi tantangan atau hambatan dalam pencapaian tujuan dan target kinerja yang diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selama tahun 2022 dan beberapa tahun ke depan yang dapat *dicluster* menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1) Isu terkait Regulasi:

- Rancangan Undang-Undang Desain Industri agar segera dapat diundangkan mengingat RUU Desain Industri tersebut diharapkan dapat segera mengantisipasi kekurangan dari UU Desain Industri yang saat ini berlaku dan juga agar Indonesia segera bisa meratifikasi perjanjian internasional *Hague Agreement* dan pembentukan Komisi Banding Desain Industri;
- Penyelarasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Revisi Terbatas Undang-Undang Hak Cipta untuk menyempurnakan pasal-pasal guna mengantisipasi perkembangan hak cipta di era digital;
- Penyempurnaan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Permenkumham tentang ketentuan teknis POPHC dan yang tidak diatur dalam undang-undang serta menguraikan tentang keadaan kahar sebagai anitipasi DJKI dalam mengelola permohonan pencatatan ciptaan;
- Adanya kekosongan hukum dalam peraturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
- Belum adanya aturan permohonan paten terkait pertahanan dan keamanan negara dalam hal permintaan pendapat kepada instansi terkait pada seksi publikasi Direktorat Paten;
- Rancangan Undang-Undang Indikasi Geografis (Pemisahan dari Undang-Undang Merek);
- Rancangan Juklak dan Juknis Pengawasan Indikasi Geografis Terdaftar;
- Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Nice Agreement dalam proses menunggu tanda tangan Presiden Republik Indonesia;
- Rancangan Pencabutan Peraturan Pemerintah Tentang Klasifikasi Barang dan Jasa Merek; serta
- Rancangan Pencabutan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Merek.

2) Isu terkait Bisnis Proses (Proses dalam Pencapaian Kinerja):

- Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan/Gratifikasi ISO 37001:2016, Sertifikasi Manajemen Mutu Layanan ISO 9001:2015, Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Sistem ISO 27000 dan Sertifikasi Sistem Manajemen Layanan TI ISO 20000-1;
- Pemetaan potensi Desain Industri untuk peningkatan permohonan KI;
- Implementasi tarif tunggal untuk optimalisasi perlindungan hak cipta;
- Pembentukan (*Pilot Project*) Indonesia *IP Academy*;
- Perjanjian Internasional terkait Indikasi Geografis;
- Pemahaman pemohon atau pemegang paten terhadap penggunaan aplikasi;
- Belum ada IPC (klasifikasi) untuk permohonan paten sehingga belum dapat di umumkan;
- Kurangnya alat dukung dan pengalaman penyidik Kekayaan Intelektual dalam menangani perkara Siber;
- DJKI tidak bisa bergerak sendiri dalam menangani perkara terkait pelanggaran di bidang Siber;

- Terkait dengan PPNS: belum adanya jabatan fungsional PPNS, Penempatan PPNS tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta tugas dan fungsi structural masih melekat pada PPNS;
- Pemanfaatan IP Market Place;
- Pelaksanaan Inpassing Analis KI bagi Pegawai Kekayaan Intelektual dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

3) Isu terkait Dukungan Teknologi Informasi dan/atau Sarana Prasarana:

- Belum optimalnya dukungan Teknologi Informasi terkait dengan Aplikasi Data Base Kekayaan Intelektual Komunal;
- Belum optimalnya aplikasi database Konsultan KI khususnya dalam pelaksanaan fungsi monitoring terhadap Konsultan KI;
- Belum optimalnya pemanfaatan data dan potensi kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan kerja untuk meningkatkan PNBPN;
- Belum optimalnya pemanfaatan data dan potensi kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan kerja untuk meningkatkan PNBPN;
- Kebutuhan akan pengembangan aplikasi E-Indikasi Geografis;
- Sistem aplikasi terkait Paten yang belum maksimal; serta
- Perlunya Pembangunan *Data Warehouse*.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2022 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai penanggung jawab organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berisi ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara lengkap.

C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2022.

D. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini adalah pentingnya keberadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang hukum dan perlindungan atas HAM yang terkait dengan hak Kekayaan Intelektual.

E. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terutama di tahun 2022.

F. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022

Pada Sub Bab ini disajikan Capaian Kinerja DJKI selama tahun 2022 dengan menguraikan setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh DJKI (masing-masing Unit Eselon II DJKI) dengan formulasi penghitungan capaian kerjanya. Selain itu juga capaian kinerja juga akan mengelaborasi capaian tersebut dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel nilai yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobor nilai 60% dan nilai IKPA dengan bobor penilaian 40%.

D. Capaian Kinerja Lainnya

1) e-performance Kementerian Hukum dan HAM

e-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

2) Target Kinerja Kemenkumham di bidang Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

3) e-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja Kementerian/Lembaga), serta digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP.

4) Kegiatan Prioritas Nasional

Capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas nasional terkait perlindungan yang diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

5) Program Unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Simpulan umum atas capaian kinerja DJKI tahun 2022.

B. Saran

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan DJKI untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja DJKI tahun 2022;
- 2) Draft Perjanjian Kinerja tahun 2023;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

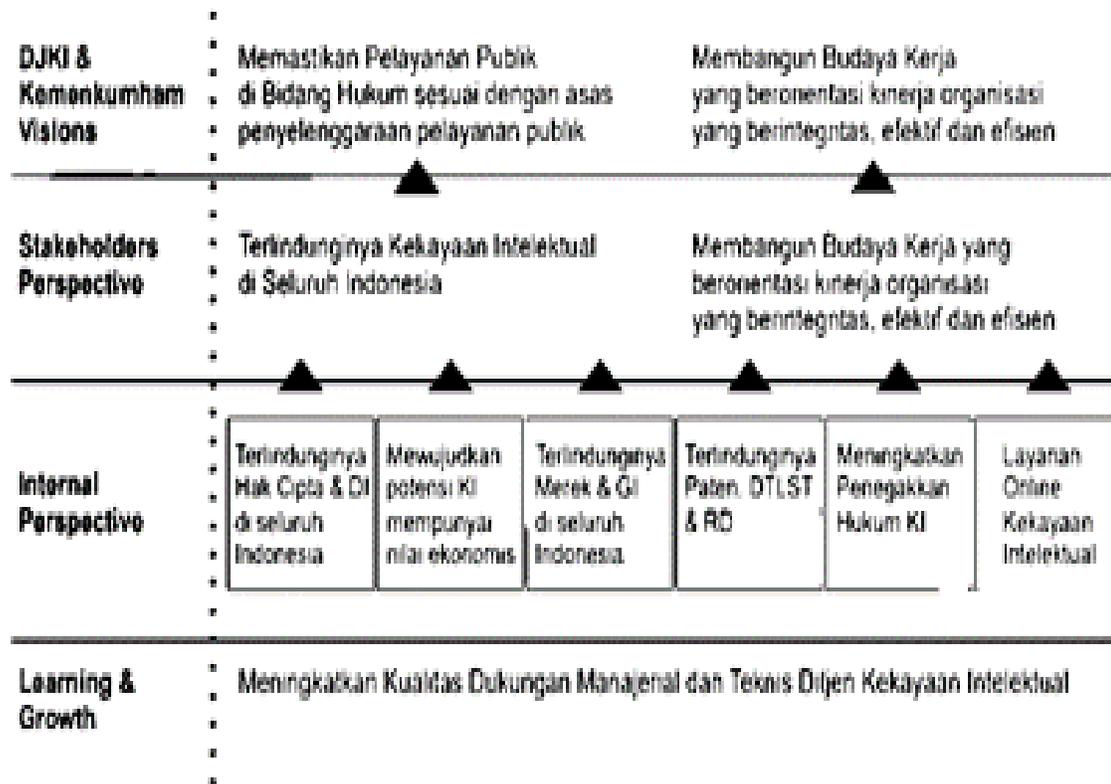
A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Dalam mewujudkan peran sasaran strategis yang sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, DJKI mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

- 1) Memastikan Pelayanan Publik di bidang Hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; serta
- 2) Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Sasaran strategis penyelenggaraan Kekayaan Intelektual merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai selama lima tahun sebagai outcome/impact dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran strategis ini menjabarkan dengan misi mewujudkan penyelenggaraan Kekayaan Intelektual yang profesional, dalam membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja, berintegritas, efektif dan efisien.

Selain itu antara sasaran juga perlu adanya Penetapan Arah kebijakan dimana yang kita ketahui sasaran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Penyelenggaraan Pelayanan dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual yang berkualitas, dimana kebijakan dapat membantu untuk memastikan keselarasan antara sasaran strategis dengan program-program yang ada. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 dapat digambarkan mulai dari *basic values*, *internal perspective*, *stakeholders' perspective*, dan *visions*. Gambar berikut menjelaskan lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020-2024 :



1) *Stakeholders Perspective (Perspektif Pemangku Kepentingan)*

Sasaran strategis pada hal-hal perspektif yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan dan ekspektasi dari sisi *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Yang harus dilakukan oleh DJKI terdiri dari 2 (dua) sasaran Program, yaitu:

- a. Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia; serta
- b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi.

2) *Internal Process Perspective (Perspektif Proses Internal)*

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses Internal yang mawadahi serangkaian aktivitas bisnis (proses bisnis) internal, dimana harus mengidentifikasi proses bisnis yang tepat supaya tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai yang harus dilakukan oleh DJKI, yang terdiri dari 6 (enam) yaitu:

- a. Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di seluruh Indonesia dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:

- Presentase Penyelesaian pencatatan hak cipta
 - Presentase penyelesaian permohonan desain industri;
- b. Mewujudkan potensi Kekayaan Intelektual mempunyai nilai ekonomis, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
- Peningkatan permohonan kekayaan intelektual
 - Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI
- c. Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
- Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi
 - Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis
- d. Terlindunginya Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang (RD) di seluruh Indonesia, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
- Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi
 - Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD
- e. Meningkatnya penegakan hukum KI, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
- Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual;
 - Peningkatan penyelesaian pelanggaran KI secara optimal
- f. Layanan Online Kekayaan Intelektual, dengan 1 indikator kegiatan sebagai berikut:
Peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal.

3) *Learning and Growth Perspective* (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)

Unsur *Learning and Growth Perspective* keberadaannya untuk mendorong *perspective* lainnya dengan berbagai elemen berfokus pada pengembangan dan pembelajaran organisasi untuk menjaga *sustainability* atau keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi. Sumber utama dari perspektif ini adalah manajemen/sistem organisasi, dan *support* atau *enabling factor* lainnya. Adapun yang harus dilakukan oleh DJKI dalam unsur ini adalah dengan melihat sasaran pada peningkatan Kualitas Dukungan Manajerial dan Teknis DJKI. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) harus memastikan setiap unit eselon II bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari *Internal Process Perspective* yang merupakan proses

bisnis internal yang mewadahi serangkaian aktivitas bisnis sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya manusia, teknologi, manajemen/sistem organisasi, dan *support* atau *enabling factor* lainnya seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Adapun secara detail sasaran strategis, IKU (Indikator Kinerja Utama) dan target yang diampu oleh DJKI dalam tahun 2021 dapat ditampilkan sebagai berikut.

Tabel Indikator Kinerja Utama DJKI Tahun 2022

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Output Program	Satuan	Target
					2022
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	Nilai Indeks	Nilai Indeks	3,32
		2. Persentase penyelesaian permohonan KI sesuai dengan peraturan yang berlaku	penyelesaian permohonan KI sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase	99%
		3. Persentase peningkatan permohonan KI	peningkatan permohonan KI	Persentase	15%
		4. Persentase peningkatan produk KI dan KI Komunal yang dilindungi	Peningkatan produk KI dan KI Komunal yang dilindungi	Persentase	7%
		5. Persentase penanganan aduan pelanggaran HKI	Penanganan aduan pelanggaran HKI	Persentase	100%

B. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2022

Penetapan Kinerja DJKI merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penetapan perjanjian kinerja, merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan kegiatan/program/kebijakan disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya rencana kerja tahunan yang dicapai berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berikut Penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel (i) Sasaran Program dan Target dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULASI	TARGET
1	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seleuruh Indonesia	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perlindungan Kekayaan Intelektual	3,32
		2. Persentase Penyelesaian permohonan Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Jumlah penyelesaian permohonan KI yang diselesaikan dalam jangka waktu yang sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di tahun berjalan (2022) dibagi dengan jumlah permohonan KI yang masuk di tahun berjalan (2022) dikali 100%	99%
		3. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual	Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun berjalan (2022) dikurangi jumlah permohonan KI yang masuk di tahun baseline (2019) dibandingkan dengan Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun baseline (2019) dikali 100%	15%
		4. Persentase Peningkatan Produk Kekayaan Intelektual dan Komunal yang Dilindungi (Prioritas Nasional)	Penyelesaian permohonan KI pada tahun berjalan (2022) dikurangi penyelesaian permohonan KI pada tahun dasar/ <i>baseline</i> (2019) dibagi capaian pada tahun dasar/ <i>baseline</i> (2019) dikali 100%. *NB: khusus untuk produk KI Komunal yang dilindungi, <i>baseline</i> nya adalah tahun 2020 sebagai tahun pertama Program Prioritas Nasional untuk inventarisasi pada Pusat Data Nasional KIK	7%
		5. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Persentase aduan yang ditangani (Jumlah aduan yang ditangani di tahun berjalan (2022) dibagi dengan jumlah permohonan aduan pelanggaran HKI yang masuk di tahun berjalan (2022) dikali 100%)	100%

Tabel (ii) Kegiatan dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 196.004.383.000,00
1	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 5.780.692.000,00
2	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Rp. 24.054.939.000,00
3	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 7.128.735.000,00
4	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 8.228.956.000,00
5	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp. 4.567.599.000,00
6	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp. 111.237.585.000,00
7	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 35.005.877.000,00
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 389.391.628.000,00
8	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp. 389.391.628.000,00
	Total	Rp 585.396.011.000,00

Tabel (iii) Perjanjian Kinerja pada Unit Eselon II DJKI Tahun 2022

Rincian indikator keluaran kegiatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja oleh masing-masing Unit Eselon II di lingkungan DJKI pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi (output)	Target	Anggaran
Pembinaan/ penyelenggaraan KI	Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	1.Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta	Persentase pencatatan hak cipta yang telah memperoleh kepastian hukum	100%	
		2.Persentase penyelesaian	Persentase permohonan	100%	

		permohonan Desain Industri	desain industri yang telah memperoleh kepastian hukum		Rp. 5.780.692.000,00
		1. Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri	Persentase penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri yang dapat berupa : - Layanan hukum bidang Cipta dan desain industri - Keberatan atas putusan penolakan DI - Panggilan sidang/pemberian keterangan sebagai saksi ahli	100%	
	Mewujudkan potensi Kekayaan Intelektual yang mempunyai nilai ekonomis	1. Persentase peningkatan permohonan KI	Persentase kenaikan permohonan KI (jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun berjalan (2022) dikurangi jumlah permohonan KI yang masuk di tahun baseline (2019) dibandingkan dengan Jumlah permohonan KI	15%	Rp 24.054.939.000,00

			yang masuk pada tahun baseline (2019) dikali 100%)		
		2. Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI	Jumlah stakeholder yang diharapkan memiliki pemahaman terkait KI sebagai hasil dari kegiatan sosialisasi dan diseminasi terkait KI yang dilakukan oleh DJKI dalam rangka pemberdayaan kekayaan intelektual = capaian jumlah stakeholder yang terdiseminasi- tersosialisasi di tahun 2022/ target stakeholder yang terdiseminasi- tersosialisasi di tahun 2022 x 100% = X% (X% x 60% = XX Stakeholder)	60%	
	Terlindungi merek dan Indikasi Geografis (IG) di seluruh Indonesia	1.Persentase merek dan IG yang dilindungi	Persentase peningkatan jumlah penyelesaian merek dan indikasi geografis (dari angka <i>baseline</i> di tahun dasar/tahun 2019)	15%	Rp 7.128.735.000,00
		2.Persentase penyelesaian	Jumlah rekomendasi	100%	

		rekomendasi hukum terkait merek dan IG	hukum yang diberikan kepada pihak yang meminta dibagi rekomendasi hukum yang diajukan pada tahun berjalan dikali 100%		
Terlindunginya Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia	1.Persentase peningkatan Paten, DTLST,dan Rahasia Dagang yang dilindungi	Jumlah dokumen permohonan Paten, DTLST, dan RD yang memperoleh kepastian hukum di tahun 2022 dibagi Jumlah dokumen permohonan Paten, DTLST, dan RD yang memperoleh kepastian hukum di tahun dasar/tahun baseline di 2019 x 100%	15%	Rp. 8.228.956.000,00	
	2.Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang	Jumlah rekomendasi hukum terkait Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang diberikan kepada pihak yang meminta dibagi rekomendasi hukum yang diajukan pada tahun berjalan dikali 100%	100%		
Terwujudnya penanganan dan	1.Persentase penanganan	Jumlah penanganan atas	100%		

	penyelesaian sengketa HKI yang optimal	aduan pelanggaran HKI	aduan pelanggaran HKI selama tahun 2022 dibagi jumlah aduan atas pelanggaran HKI yang disampaikan kepada DJKI selama tahun 2022 dikali 100%		Rp 4.567.599.000,00
		2.Persentase penyelesaian sengketa HKI secara optimal	Jumlah penyelesaian sengketa HKI di tahun berjalan tahun 2022 (baik melalui proses SP3 atau P21) dibagi jumlah kasus pelanggaran HKI yang masih berjalan dikali 100%	70%	
	Terwujudnya sistem manajemen data informasi dan pelayanan KI berbasis IT yang sistematis, efektif, handal, dan berkelanjutan	Peningkatan layanan Teknologi Informasi KI yang aman dan handal	Persentase pemberian layanan Teknologi Informasi KI yang aman dan handal yang meliputi seluruh kegiatan layanan system informasi, pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual di tahun 2022	99.50 %	Rp 111.237.585.000,00
	Meningkatnya kualitas dukungan	1.Indeks Reformasi Birokrasi DJKI	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi DJKI	82	

	manajerial dan teknis DJKI		Tahun 2022		Rp 389.391.628.000,00
		2.Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan DJKI	Nilai Indeks Survei IKM atas layanan DJKI Tahun 2022 (dalam skala indeks maksimum 4)	3,32	
		3.Nilai SAKIP DJKI dengan predikat 'Baik'	Nilai SAKIP DJKI Tahun 2022	80,5	
		4.Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA	Nilai SMART DJKI Tahun 2022 (dalam persentase)	93%	
		5.Nilai IKPA DJKI Tahun 2022	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran DJKI Tahun 2022	80	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022

Pada Sub Bab ini disajikan Capaian Kinerja DJKI selama tahun 2022 dengan menguraikan setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II DJKI disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh DJKI dengan dilengkapi formulasi penghitungan capaian kerjanya.

1) Capaian Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Renstra 2020-2024

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang memiliki jumlah SDM sebanyak 581 orang ASN (termasuk 1 Orang Eselon I dan 7 orang Eselon II) telah melaksanakan tugasnya dengan didasarkan atas sasaran program berupa ‘**Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia**’ berikut Indikator kerjanya. Adapun berikut disampaikan capaian atas sasaran program DJKI pada tahun anggaran 2022.

Tabel (iv) Capaian Kinerja Sasaran Program DJKI TA 2022

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Penghitungan	Satuan	Target	Capaian
					2022	2022
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	Nilai indeks kepuasan masyarakat atas layanan Kekayaan Intelektual di tahun 2022	Indeks	3,32	3,46
		2) Persentase penyelesaian permohonan KI sesuai dengan	Jumlah penyelesaian permohonan KI yang diselesaikan di tahun berjalan (2022) dibagi	Persent	99%	115,37%

		peraturan yang berlaku	dengan jumlah permohonan KI yang masuk di tahun berjalan (2022) dikali 100%	ase		
		3)Persentase peningkatan permohonan KI	Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun berjalan (2022) dikurangi jumlah permohonan KI yang masuk di tahun baseline (2019) dibandingkan dengan Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun baseline (2019) dikali 100%	Persentase	15%	58,61%
		4)Persentase penanganan aduan pelanggaran HKI	Jumlah aduan pelanggaran HKI yang ditangani/ditindaklanjuti di tahun berjalan (2022) dibagi dengan jumlah aduan pelanggaran HKI yang masuk di tahun berjalan (2022)	Persentase	100%	100%
		5)Persentase peningkatan produk KI	Penyelesaian permohonan KI pada tahun berjalan (2022)			

		dan Komunal yang dilindungi	dikurangi penyelesaian permohonan KI pada tahun dasar/ <i>baseline</i> (2019) dibagi capaian pada tahun dasar/ <i>baseline</i> (2019) dikali 100%. *NB: khusus untuk produk KI Komunal yang dilindungi, <i>baseline</i> nya adalah tahun 2020 sebagai tahun pertama Program Prioritas Nasional untuk inventarisasi pada Pusat Data Nasional KIK.	Persentase	7%	46,05%
--	--	-----------------------------	---	------------	----	---------------

NB: Adapun yang menjadi tahun dasar/tahun *baseline* adalah tahun terakhir pada periode Renstra sebelumnya (Renstra 2014 – 2019), dalam hal ini adalah tahun 2019 sebagai tahun dasar dari penghitungan untuk Periode Renstra Selanjutnya (Renstra 2020 – 2024) sehingga tahun 2019 dimasukkan dalam table di atas.

2) Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022 berdasarkan Renstra 2020-2024

A) Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual (target: 3,32, capaian: 3,46)

Capaian indikator kinerja dari Sasaran Program berupa “**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual**” ini dicapai melalui Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KI. Indeks

Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI di tahun 2022 mencapai nilai indeks **3,46**. Angka ini melebihi dari target indeks yang ditetapkan di tahun 2022 yaitu 3,32. Angka indeks ini juga mengalami peningkatan capaian dibanding tahun-tahun sebelumnya dimana tahun sebelumnya yaitu 2020 IKM untuk layanan KI mencapai 3,28 dan di tahun 2019 mencapai 3,30.

Tabel (v) Perbandingan Capaian Survei IKM Layanan KI dalam Beberapa Tahun

Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024
3,30	3,30	3,30	3,28	3,30	3,39	3,32	3,46	3,34	3,36

Jika melihat perbandingan capaian dari tahun 2022 dibandingkan dengan capaian di 3 tahun sebelumnya maka indeks kepuasan masyarakat atas layanan KI mengalami peningkatan signifikan. Jika melihat penentuan target di tahun berikutnya yaitu tahun 2023 dan 2024 maka target di kedua tahun berikut berdasarkan hasil capaian di tahun 2022 maka berdasarkan capaian di tahun 2022 yang mencapai nilai indeks 3,46 maka asumsi optimis capaian di kedua tahun mendatang dapat tercapai. Adapun raihan capaian di tahun 2022 yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya salah satu faktor utamanya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan KI. Tahun 2022 diluncurkan sistem pengajuan otomatisasi permohonan Hak Cipta dan Perpanjangan Merek (POP HC dan POP Perpanjangan Merek), terbukti hasil dari inovasi layanan berbasis TI ini meningkatkan permohonan KI sebanyak 26,41% jika dibandingkan tahun 2021.

Hasil survei ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dan peningkatan kualitas mutu kinerja. Kegiatan IKM dilakukan melalui riset kualitatif (FGD atau *in depth interview*).

Survei IKM dilakukan pada 11 wilayah yaitu: DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua. Survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh DJKI bersama dengan pihak ke-3 di luar Kementerian Hukum dan HAM yaitu dengan

Konsultan Independen berskala Nasional yang biasa melakukan survey atas layanan kepuasan masyarakat dari suatu lembaga pemerintah dan non pemerintah yaitu Katadata *Insight Center*, berdasarkan PERMEN PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, semua unit pelayanan instansi pemerintah baik yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Pendekatan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB tersebut, ada 9 (sembilan) unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, pada survei ini menggunakan 11 unsur kepuasan masyarakat, yakni:

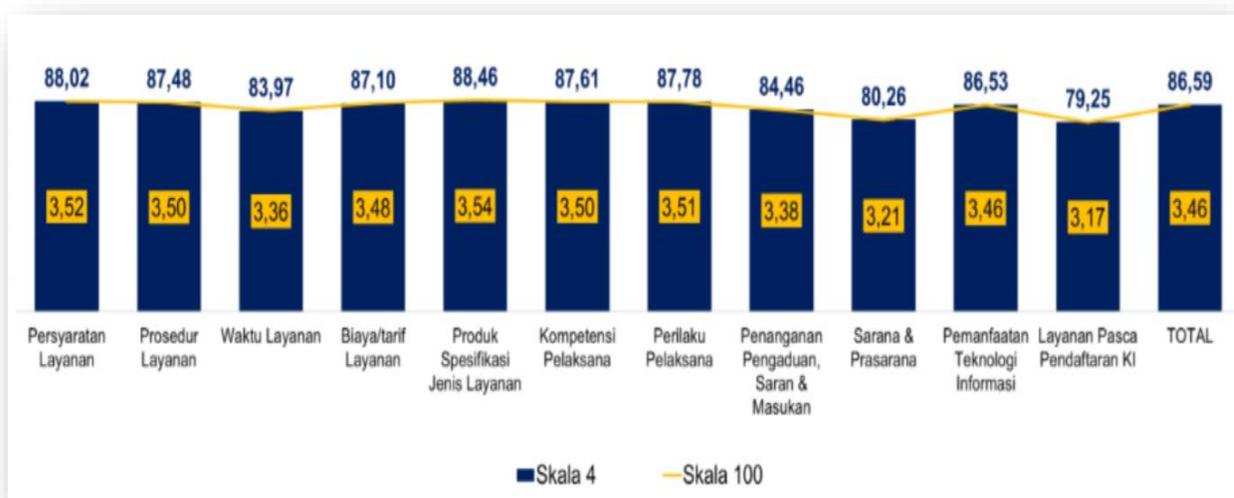
- Persyaratan;
- Prosedur;
- Waktu Pelayanan;
- Biaya/Tarif;
- Produk spesifikasi jenis pelayanan;
- Kompetensi Pelaksana;
- Perilaku Pelaksana;
- Sarana Layanan;
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- Pemanfaatan TI;
- Layanan Pasca Pendaftaran KI

Survei ini menargetkan 800 responden, namun pada pelaksanaannya berhasil mendapatkan sebanyak **1.162 responden**. Jumlah responden terbanyak yakni DKI Jakarta dan Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan jumlah pemohon yang memang lebih banyak pada kedua wilayah tersebut. Hasil survei indeks kepuasan Masyarakat, pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dapat digambarkan sebagai berikut:



Untuk penilaian tingkat Kepuasan Masyarakat meningkat dari nilai 86,50 (ekuivalen dengan 3,39 dari skala 4) pada tahun 2021 menjadi **86,59** (ekuivalen dengan **3,46** dari skala 4) di tahun 2022. Parameter dengan indeks tertinggi adalah Produk Spesifikasi Jenis Layanan yakni sebesar 3,54 (88,46) dan masuk dalam kategori sangat baik. Seluruh parameter lainnya juga berada dalam kategori baik. Adapun parameter dengan nilai indeks terendah adalah Layanan Pasca Pendaftaran KI yakni sebesar 3,17 (79,25).

Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI Tahun 2022

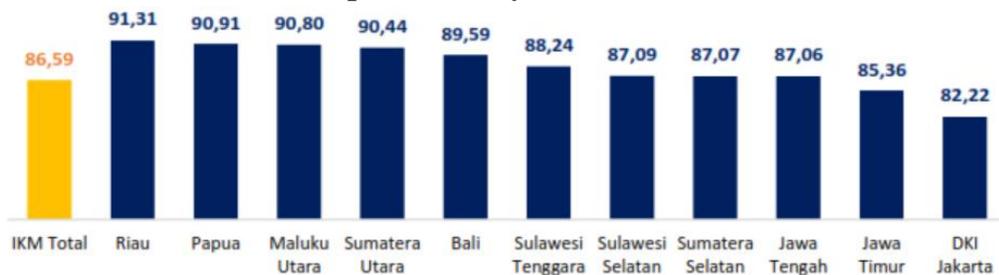


Nilai Interval (Skala 4)	Nilai Interval Konversi (Skala 100)	Mutu Layanan	Nilai Mutu Layanan
1,0000 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,6000 – 3,0643	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3,0644 – 3,5323	76,61 – 88,30	B	Baik
3,5324 – 4,0000	88,31 – 100,0	A	Sangat Baik

Secara total, Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami sedikit peningkatan dari nilai 86,50 pada tahun 2021 menjadi 86,59 di tahun 2022. Demikian pula jika diamati pada setiap parameter, hampir seluruhnya mengalami peningkatan dengan yang tertinggi adalah parameter prosedur layanan, waktu layanan dan produk spesifikasi jenis layanan. Indeks kepuasan parameter biaya/tarif, penanganan pengaduan dan pemanfaatan teknologi informasi, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun parameter maklumat pelayanan tidak digunakan pada survei tahun 2021 & 2022 ini karena merujuk pada PermenPAN-RB No 14 Tahun 2017, parameter maklumat pelayanan digantikan dengan parameter sarana & prasarana.

Indeks Kepuasan Masyarakat di seluruh provinsi yang disurvei telah berada dalam kategori baik. Bahkan untuk pemohon di wilayah Riau, Papua, Maluku Utara, Sumatera Utara, dan Bali menilai kinerja layanan permohonan KI sangat baik karena memiliki nilai indeks di atas 88,30. Hampir seluruh parameter di setiap provinsi juga telah berada dalam kategori Baik dan Sangat Baik. Namun untuk parameter layanan pasca pendaftaran KI yang memiliki indeks total terendah, dapat dilihat bahwa penyumbang nilai terendah adalah di Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Selatan yakni masing-masing sebesar 71,35 dan 73,75.

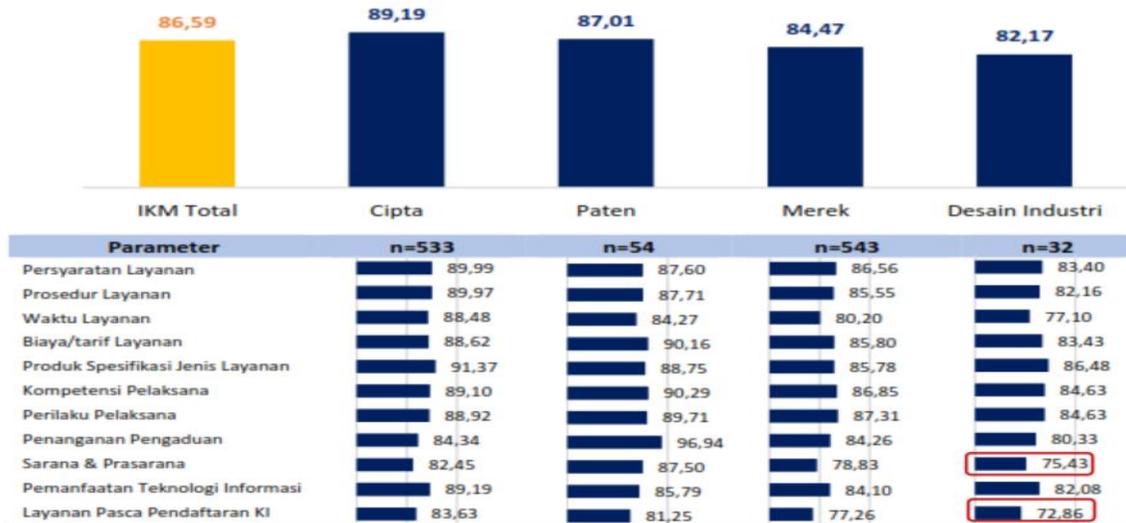
Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat menurut Provinsi



Parameter	n=30	n=43	n=39	n=33	n=132	n=48	n=43	n=88	n=124	n=424	n=158
Persyaratan Layanan	92,22	90,93	91,03	91,52	90,08	90,63	88,37	88,30	89,03	86,58	85,25
Prosedur Layanan	91,56	90,78	90,60	92,02	89,52	88,54	88,60	87,77	88,95	86,05	84,28
Waktu Layanan	91,44	91,86	89,66	89,19	88,11	85,21	86,20	85,04	83,95	82,93	75,65
Biaya/tarif Layanan	90,83	91,05	90,77	91,82	90,08	88,65	85,70	87,27	85,60	86,20	84,37
Produk Spesifikasi Jenis Layanan	92,33	93,72	91,79	90,61	92,42	89,38	91,86	88,86	88,47	86,58	85,32
Kompetensi Pelaksana	90,63	90,47	92,60	90,91	91,22	87,79	85,83	88,81	88,10	87,34	82,42
Perilaku Pelaksana	87,92	89,69	93,20	92,73	90,88	89,81	83,67	87,98	86,53	87,76	84,14
Penanganan Pengaduan	87,92	89,55	91,17	98,33	85,00	86,79	92,50	85,00	86,61	83,01	78,68
Sarana & Prasarana	75,83	78,13	82,92	86,09	78,52	85,00	75,31	76,14	76,31	81,60	79,51
Pemanfaatan Teknologi Informasi	91,86	90,67	90,69	89,81	89,67	87,74	86,05	86,87	88,10	85,40	81,62
Layanan Pasca Pendaftaran KI	85,83	77,86	87,50	75,00	77,22	80,00	81,43	73,75	80,25	83,50	71,35

Indeks Kepuasan Masyarakat untuk setiap jenis permohonan telah berada dalam kategori Baik karena memiliki skor dalam rentang nilai 76,61 – 88,30. Bahkan untuk permohonan Cipta telah masuk kategori sangat baik karena memiliki skor di atas 88,30. Hampir seluruh parameter di setiap jenis permohonan juga telah dinilai baik dan sangat baik. Hanya parameter Layanan Pasca Pendaftaran KI serta Sarana & Prasarana yang dinilai cukup baik oleh pemohon Desain Industri.

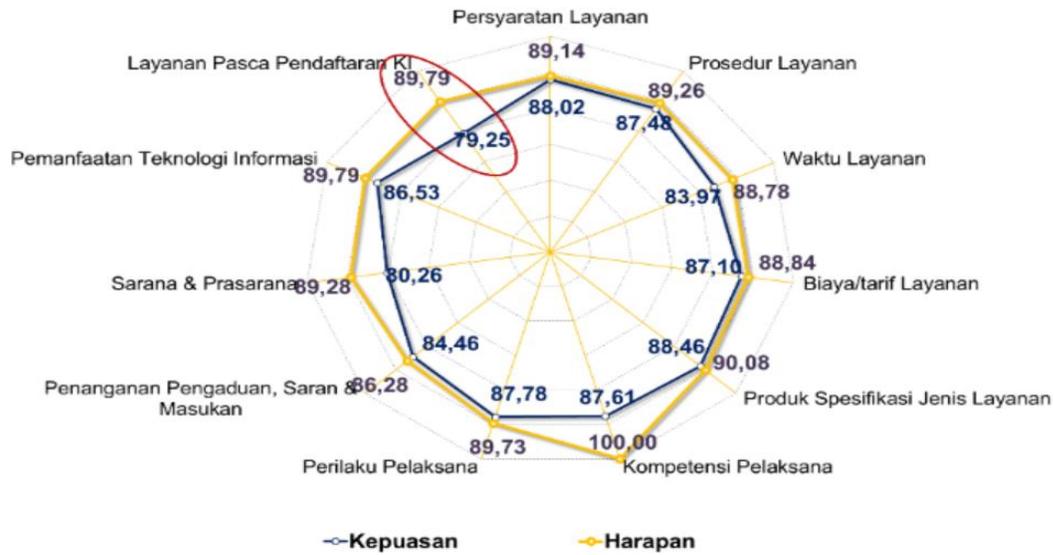
Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat menurut Jenis Permohonan KI



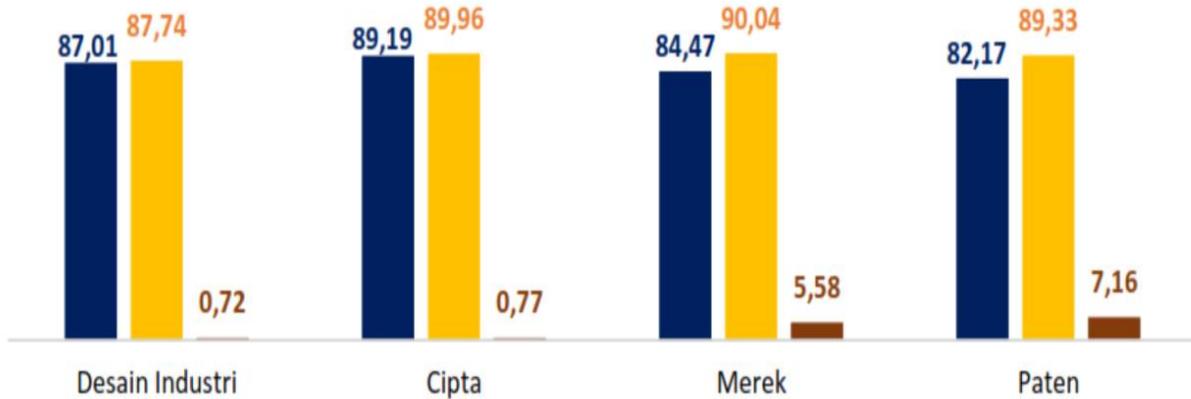
Selain itu survei IKM dilakukan untuk melihat antara kepuasan, harapan dan GAP (Kesenjangan Antara Persepsi dan Harapan) yang dihasilkan pada setiap pemohon layanan KI, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Parameter dengan gap tertinggi adalah Layanan Pasca Pendaftaran KI dan Kompetensi Petugas yakni masing-masing sebesar 10,53 dan 12,39. Sementara gap terendah adalah Persyaratan Layanan yakni sebesar 1,12. Meskipun secara IKM Total DJKI sudah dinilai Baik, namun ekspektasi atau harapan pengguna layanan pun juga semakin meningkat. Ini menjadi tantangan bagi institusi penyelenggara layanan publik untuk dapat terus meningkatkan kualitas layanannya minimal dapat mendekati harapan penggunanya. Perbaikan layanan dapat diprioritaskan pada parameter yang memiliki gap tertinggi terlebih dahulu.

Grafik Kesenjangan Antara Persepsi dan Harapan Survei IKM Layanan KI 2022 (Total)

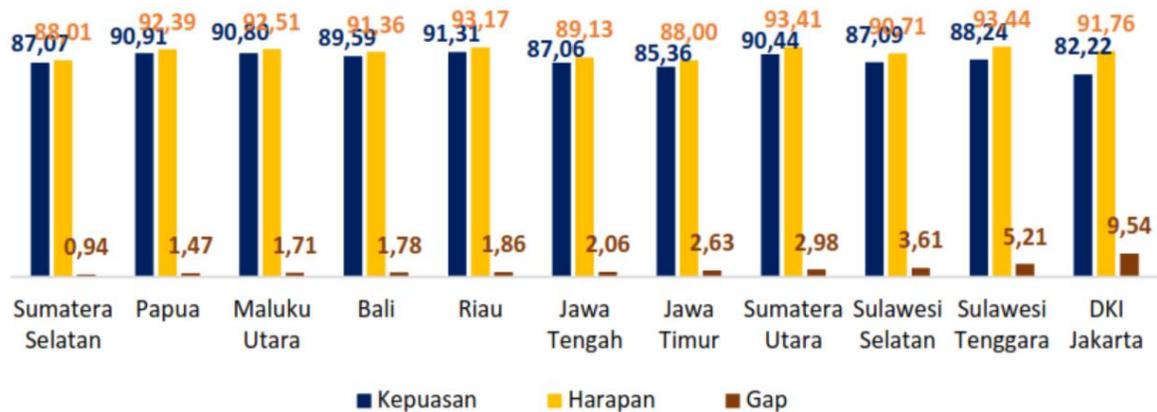


Grafik Kesenjangan Antara Persepsi dan Harapan Survei IKM Layanan KI 2022 berdasarkan Jenis Permohonan



Jika diamati berdasarkan jenis permohonan, pemohon kategori Merek dan Paten memiliki nilai gap tertinggi yakni di atas 5,00. Sementara kategori Cipta dan Desain Industri nilai gap-nya cukup rendah yakni hanya kurang dari 1,00.

Grafik Kesenjangan Antara Persepsi dan Harapan Survei IKM Layanan KI 2022 berdasarkan Provinsi



Meskipun secara nilai IKM seluruh Provinsi sudah dalam kategori baik dan sangat baik, namun ekspektasi atau harapan pengguna layanan pun juga semakin meningkat. Ini menjadi tantangan bagi institusi penyelenggara layanan publik untuk dapat terus meningkatkan kualitas layanannya minimal dapat mendekati harapan penggunanya. 3 Provinsi dengan gap tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan DKI Jakarta. Artinya pemohon di wilayah tersebut relatif lebih kritis dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap layanan permohonan KI, dibandingkan pemohon di provinsi lainnya. Secara umum, parameter layanan yang memiliki nilai kesenjangan (gap) antara kepuasan dan harapan yang tertinggi adalah Layanan Pasca Pendaftaran KI dan Kompetensi Petugas yakni masing-masing sebesar 10,53 dan 12,39. Sementara gap terendah adalah Persyaratan Layanan yakni sebesar 1,12.

Parameter dengan indeks tertinggi adalah Produk spesifikasi jenis layanan (88,46) dan terendah adalah (79,25). Namun seluruh parameter telah berada dalam kategori baik. Secara keseluruhan, Net Promoter Score layanan permohonan KI adalah sebesar 76,3%. Nilai ini sudah masuk dalam kategori World Class. Artinya, selain memiliki indeks kepuasan yang baik, loyalitas pengguna layanan DJKI pun tergolong sangat baik. Net Promoter Score di 9 provinsi juga hampir seluruhnya telah masuk kategori World Class, karena memiliki nilai NPS di atas 71. Hanya Jawa Tengah & Sulawesi Tenggara yang berada dalam kategori *Excellent*. Sedangkan terhadap masih adanya kesenjangan antara harapan dan persepsi terhadap layanan yang diterima oleh pemohon KI maka menjadi masukan berharga bagi DJKI dalam rangka melakukan perbaikan layanan agar lebih optimal.

B) Indikator: Persentase Penyelesaian Permohonan KI sesuai dengan Peraturan yang berlaku (Target: 99%, Capaian: 115,37%)

Permohonan KI 2022	Penyelesaian Permohonan KI 2022
Merek: 120.216	Merek: 167.887
Hak Cipta: 117.083	Hak Cipta: 117.083
Paten: 14.062	Paten: 8.815
Desain Industri: 4.877	Desain Industri: 2.469
Indikasi Geografis: 26	Indikasi Geografis: 17
KI Komunal: 1.071	KI Komunal: 633

Jenis Layanan	Permohonan KI 2020	Penyelesaian Permohonan KI 2020	Permohonan KI 2021	Penyelesaian Permohonan KI 2021	Permohonan KI 2022	Penyelesaian Permohonan KI 2022
Hak Cipta	57.814	55.678	83.078	83.810	117.083	117.083
Desain Industri	3.967	3.270	4.366	4.127	4.877	2.469
Merek & Indikasi Geografis (IG)	116.571	236.524 (236.517 Merek dan 7 IG)	96.313 (96.285 Merek, 28 IG)	155.853 (155.845 Merek, 8 IG)	120.242 (Merek: 120.216 IG: 26)	167.904 (Merek: 167.887 IG: 17)
Paten	10.858	12.509	12.473	14.610	14.062	8.815
KI Komunal	514	84	1041	671	1071	633
total	189.724	308.065	197.271	259.071	257.335	296.904

Data permohonan dan penyelesaian permohonan KI di tahun dasar baseline (2019) adalah sebagai berikut:

Jenis Layanan	Total Permohonan KI 2019	Total Penyelesaian Permohonan KI 2019
Hak Cipta	42.768	42.768
Desain Industri	4.361	5.313
Merek & Indikasi Geografis (IG)	101.830	137.676
Paten	12.606	18.658
total	161.565	203.319

Adapun jumlah penyelesaian capaian pada indikator kinerja program ini memiliki komponen penghitungan sebagaimana yang disajikan pada table di atas berupa:

“Jumlah penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tahun berjalan (2022) dibagi jumlah permohonan KI di tahun berjalan (2022) x 100%”

$$(296.904 \text{ dokumen} : 257.335 \text{ dokumen}) \times 100\% = (xxx) : 1,1537 \times 100 \% = 115,37\% \text{ (capaian di tahun 2022)}$$

Capaian di tahun 2022 untuk output program di atas yaitu 115,37% telah melampaui target capaian yang menetapkan sejumlah 99% penyelesaian permohonan KI yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian di tahun 2022 juga secara signifikan mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian di tahun-tahun sebelumnya. Hampir di semua rezim KI mengalami peningkatan penyelesaian permohonan KI dan KI Komunal. Sedangkan terkait dengan Paten walaupun secara penyelesaian permohonan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 namun penyelesaian permohonan di tahun 2022 merupakan penyelesaian permohonan yang diselesaikan sesuai dengan jangka waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan (sudah tidak terdapat penyelesaian permohonan backlog/permohonan yang diselesaikan melebihi jangka waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan), sehingga capaian penyelesaian Paten juga termasuk prestasi pencapaian. Capaian tersebut patut diapresiasi mengingat walaupun pandemic COVID-19 masih tetap ada di paruh awal tahun 2022, namun dengan berbagai inovasi terutama terkait dengan optimalisasi Teknologi Informasi maka jumlah proses penyelesaian permohonan KI mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan tahun 2021 dan tahun 2020 (walaupun di tahun 2020 penyelesaian permohonan yang tertera pada table di atas termasuk penyelesaian permohonan atas backlog permohonan juga).

Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024
99%	81,6%	99%	115,37%	99%	99%

Sedangkan jika capaian di tahun 2022 dibandingkan dengan proyeksi kedepan target di tahun 2023-2024 maka dengan asumsi positif capaian sebagaimana di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 maka secara asumsi optimis target di 2023 dan 2024 pun akan tercapai.

C) Indikator: Persentase Peningkatan Permohonan KI (target: 15%, capaian: 58,61%)

Persentase peningkatan permohonan KI merupakan *progress* persentase permohonan KI di tahun berjalan (tahun pertanggungjawaban LKIP) dibandingkan jumlah permohonan KI di tahun *baseline* yaitu tahun 2019, mengingat 2019 merupakan tahun terakhir dari periode Renstra sebelumnya. Sehingga di akhir periode renstra 2020-2024 dapat dilihat sejauh mana progress dari pertumbuhan permohonan KI yang diajukan kepada DJKI. Capaian pada output program ini memiliki komponen penghitungan sebagaimana yang disajikan pada table di atas berupa:

Jenis Layanan	Total Permohonan KI 2020	Total Permohonan KI 2021	Total Permohonan KI 2022
Cipta	57.814	83.078	117.083
DI	3.967	4.349	4.877
Merek & IG	116.571	103.667 (103.639 Merek, 28 IG)	120.242 (Merek: 120.216 IG: 26)
Paten	10.858	12.467	14.062
total	189.210	203.561	256.264

Jenis Layanan Total Permohonan KI 2019	
Cipta	42.768
DI	4.361
Merek&IG	101.830
Paten	12.606
total	161.565

Capaian pada IKK ini memiliki formulasi penghitungan berikut:

“Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun berjalan (2022) dikurang jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun dasar/tahun baseline (2019) dibagi jumlah permohonan KI tahun dasar/baseline (tahun 2019) dikali 100%.”

$$(256.264 - 161.565) : 161.565 \times 100\% = 94.699 : 161.565 = 0,5861 \times 100\% = \mathbf{58,61\%}$$

Capaian pada output program ini sebesar 58,61% jauh melebihi target yang ditetapkan untuk dicapai di tahun 2022 yaitu 15%. Adapun pada tahun 2021 terdapat peningkatan permohonan KI sebesar 21,45% jika dibandingkan tahun dasar/baseline di tahun 2019, dimana capaian tahun 2021 tersebut pun melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 12%. Sedangkan jika dilihat progress peningkatan permohonan KI yang masuk di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 terdapat peningkatan sebesar 25,89%, capaian ini juga jauh melampaui capaian peningkatan per tahun baik jika dibandingkan dengan peningkatan permohonan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 4,34% maupun dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang mencapai 17,11%.

Tahun	Target (%peningkatan berdasarkan tahun baseline: 2019)	Capaian %peningkatan permohonan KI (dibanding tahun baseline: 2019)	Capaian %peningkatan permohonan KI (dibanding tahun sebelumnya)
2020	7%	17,11%	N/A (2019 belum terdapat target capaian ini)
2021	12%	21,45%	4,34%
2022	15%	58,61%	25,89%

Adapun justifikasi dari terlampauinya target capaian kinerja dipengaruhi beberapa faktor, misalnya terkait dengan optimalisasi layanan TI pada seluruh layanan penerimaan permohonan KI secara online. Selain itu adanya berbagai program unggulan DJKI yang banyak melakukan diseminasi dan edukasi KI seperti Mobile IP Clinic, Yasonna Mendengar, DJKI Mengahar menjadikan tingkat animo masyarakat dalam mendaftarkan KI terutama dari rezim Hak Cipta dan Merek mengingat geliat pelaku

ekonomi khususnya dari UMKM yang mulai bangkit pasca pandemic COVID-19 turut mempengaruhi peningkatan jumlah permohonan secara signifikan. Kiranya capaian ini juga dapat mencerminkan bahwa penyediaan layanan permohonan KI dapat dikatakan cukup dikenal dan memuaskan masyarakat pengguna layanan KI hal ini nanti dapat dilihat pada capaian yang terkait pada Indeks Kepuasan Masyarakat.

Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024
7%	17,11%	12%	21,45%	15%	58,61%	17%	20%

Sedangkan jika capaian di tahun 2022 dibandingkan dengan proyeksi kedepan target di tahun 2023-2024 maka dengan asumsi positif capaian sebagaimana di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 dan 2020 maka secara asumsi optimis target di 2023 dan 2024 pun akan tercapai hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan massif optimalisasi penggunaan teknologi informasi KI dalam proses pengajuan permohonan KI secara online untuk semua jenis KI dengan harapan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan KI pada umumnya dan membantu pemohon KI dalam mengajukan permohonan pendaftaran atau pencatatan KI-KIK. Selain itu efek dari pelaksanaan berbagai kegiatan dalam Program Unggulan seperti *Mobile IP Clinic* dalam menjangkau bola potensi permohonan KI domestik dalam bentuk kegiatan diseminasi informasi pemahaman dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat yang dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia bekerja sama dengan 33 Kanwil Kemenkumham, DJKI Mengajar, lalu *Patent Drafting* juga mendorong kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan KI.

D) Indikator: Persentase Peningkatan Produk KI dan KI Komunal yang dilindungi (target: 7%, capaian: 46,05%)

Penyelesaian permohonan KI termasuk penyelesaian permohonan KI Konvensional yang dimiliki secara privat (Hak Cipta, Desain Industri, Merek, Paten) dan KI Komunal yang dimiliki atau diemban secara komunal (Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik). Sehingga perhitungan atas capaian pada output program tersebut adalah sebagai berikut:

- Produk KI Konvensional
(Penyelesaian permohonan KI Konvensional yang dimiliki secara privat) = **296.254**
 - Produk KI Komunal
(Permohonan IG yang mendapat Kepastian hukum/IG terdaftar (13)
+ KI Komunal yang Tervalidasi (633) = **646**
- _____ +
- Total produk KI dan KI Komunal yang dilindungi** **296.900**

Sedangkan khusus untuk data terkait Kekayaan Intelektual Komunal yang telah tervalidasi pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal di tahun 2022 terdapat sebanyak 633 KIK yang tervalidasi, sedangkan di 2021 terdapat sebanyak 595 data yang telah tervalidasi, dan pada tahun 2020 tercatat data KIK sebanyak 201 yang telah tervalidasi. Capaian dari tahun ke tahun tersebut menunjukkan adanya peningkatan perlindungan defensive atas KIK yang diajukan permohonan pencatutannya di Pusat Data Nasional KIK, dimana pada periode 2022 terdapat sebanyak permohonan KI Komunal yang tercatat. Jadi ada peningkatan perlindungan atas inventarisasi data KIK yang dilindungi oleh negara melalui Pusat Data Nasional KIK sebagai salah satu program prioritas nasional pembangunan yang diemban oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sedangkan terkait dengan Indikasi Geografis (IG), walaupun IG memiliki sistem perlindungan yang hampir sama dengan sistem KI Konvensional (seperti merek) yaitu melalui pendaftaran IG, namun kepemilikan atas produk IG dimiliki secara komunal. Sehingga produk IG terdaftar juga termasuk di dalam produk KI Komunal yang dilindungi.

Jenis Layanan	Permohonan KI 2020	Penyelesaian Permohonan KI 2020	Permohonan KI 2021	Penyelesaian Permohonan KI 2021	Permohonan KI 2022	Penyelesaian Permohonan KI 2022
Hak Cipta	57.814	55.678	83.078	83.810	117.083	117.083
Desain Industri	3.967	3.270	4.366	4.127	4.877	2.469
Merek & Indikasi Geografis	116.571	236.524 (236.517 Merek dan	96.313 (96.285 Merek, 28	155.853 (155.845 Merek, 8	120.242 (120.216 Merek, 26	167.900(16 7.887 Merek, 13

(IG)		7 IG)	IG)	IG)	IG)	terdaftar IG)
Paten	10.858	12.509	12.473	14.610	14.062	8.815
KI Komunal	514	84	1041	671	1071	633
total	189.724	308.065 (307.974 KI Konvensional, 7 produk IG terdaftar sebagai KIK dan 84 KIK tervalidasi)	197.271	259.071 (258.392 KI konvensional, 8 Produk IG sebagai KIK dan 671 KIK tervalidasi)	257.335	296.900 (296.254 KI Konvensional dan 13 Produk IG sebagai KI Komunal)

Data permohonan dan penyelesaian permohonan KI di tahun dasar (2019) adalah sebagai berikut:

Jenis Layanan Total Permohonan KI 2019		Total Penyelesaian Permohonan KI 2019
Hak Cipta	42.768	42.768
Desain Industri	4.361	5.313
Merek & Indikasi Geografis (IG)	101.830	137.676
Paten	12.606	18.658
total	161.565	203.319 (sebagai baseline pembanding)

*Nb:Khusus untuk produk KI Komunal yang tervalidasi, *baseline* nya adalah tahun 2020 sebagai tahun pertama Program Prioritas Nasional untuk inventarisasi pada Pusat Data Nasional KIK.

Sehingga capaian pada indikator ini memiliki komponen penghitungan sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas berupa

“Penyelesaian permohonan KI pada tahun berjalan (2022) ditambah KIK yang terdaftar (produk IG terdaftar) dan KIK tervalidasi di tahun 2022 dikurangi penyelesaian permohonan KI pada tahun dasar/baseline(2019) dibagi capaian pada tahun dasar/baseline (2019) dikali 100%”

$$\begin{aligned}
 & ((296.254 + 646) - 203.319) : 203.319 = (296.900 - 203.319) : 203.319 \times 100\% \\
 & = 93.581 : 203.219 \times 100\% = 0,4605 \times 100\% = \mathbf{46,05\%}
 \end{aligned}$$

Persentase capaian Produk KI dan KI Komunal yang dilindungi di tahun 2022 jika dibanding di tahun 2021 dan 2020 maka akan tampak sebagai berikut:

Jenis Cakupan Perlindungan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Produk KI Konvensional	307.974	258.392	296.254
Produk KI Komunal (tervalidasi)	201 (KIK tervalidasi) + 7 (IG terdaftar) = 208	595 (KIK tervalidasi) + 8 (IG terdaftar) = 603	633 (KIK tervalidasi) + 13 IG terdaftar = 646
Total	308.182	258.995	296.900
Persentase perlindungan (dibandingkan tahun 2019 sebagai <i>baseline</i>)	51,57%	27,38%	46,05%

Capaian tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan terkait dengan perlindungan KI Konvensional khususnya pada jenis Paten walaupun secara penyelesaian permohonan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 namun penyelesaian permohonan di tahun 2022 merupakan penyelesaian permohonan yang diselesaikan sesuai dengan jangka waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan (sudah tidak terdapat penyelesaian permohonan *backlog*/permohonan yang diselesaikan melebihi jangka waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan), sehingga capaian penyelesaian Paten juga termasuk prestasi pencapaian. Selain itu mengingat pihak yang mengajukan dari permohonan KI Konvensional memang lebih banyak dari perorangan karena sifat dari KI Konvensional adalah perlindungan bagi personal/privat.

Selanjutnya terkait dengan perlindungan atas produk KI Komunal mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan capaian terkait KI Komunal banyak merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait seperti dinas maupun dengan pihak DJKI sehingga dapat lebih banyak dilakukan pendataan inventarisasi dalam jumlah yang lebih banyak jika dilakukan hanya oleh satu pihak tertentu. Mengingat pihak yang mengajukan dari permohonan KI Komunal memang lebih banyak dari pemerintah daerah, dinas atau masyarakat pengemban dari suatu KI Komunal.

Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024
7%	17,11%	12%	21,45%	15%	58,61%	17%	20%

Sedangkan jika capaian di tahun 2022 dibandingkan dengan proyeksi kedepan target di tahun 2023-2024 maka dengan asumsi positif capaian sebagaimana di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 dan 2020 maka secara asumsi optimis target di 2023 dan 2024 pun akan tercapai hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan massif optimalisasi penggunaan teknologi informasi KI dalam proses pengajuan permohonan KI secara online untuk semua jenis KI dengan harapan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan KI pada umumnya dan membantu pemohon KI dalam mengajukan permohonan pendaftaran atau pencatatan KI-KIK. Selain itu efek dari pelaksanaan berbagai kegiatan dalam Program Unggulan seperti *Mobile IP Clinic* dalam menjangkau bola potensi permohonan KI domestik dalam bentuk kegiatan diseminasi informasi pemahaman dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat yang dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia bekerja sama dengan 33 Kanwil Kemenkumham, DJKI Mengajar, lalu *Patent Drafting* juga mendorong kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan KI.

E) Indikator: Persentase penanganan aduan pelanggaran HKI (target: 100%, capaian: 100%);

Adapun jumlah penyelesaian capaian pada indikator output program ini memiliki komponen penghitungan sebagaimana yang disajikan pada table A.1 di atas berupa:

“Jumlah aduan pelanggaran HKI yang ditangani/ditindaklanjuti di tahun berjalan (2022) dibagi dengan jumlah aduan pelanggaran HKI yang masuk di tahun berjalan (2022)”

Pada tahun 2022 terdapat 46 aduan pelanggaran HKI yang ditangani atau ditindaklanjuti dibagi jumlah aduan pelanggaran yang masuk di tahun 2022 yaitu terdapat 46 (empat puluh enam) sehingga formulasi penghitungan capaian output program di atas adalah:

$$46 : 46 \times 100\% = 100\%$$

Komponen pelanggaran HKI yang ditangani/ditindaklanjuti terdiri dari penyelesaian perkara sebanyak 25 aduan pelanggaran dan 34 permohonan mediasi yang dilakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian atas output program penanganan aduan pelanggaran HKI telah mencapai hasil yang optimal pada tahun 2022 yaitu mencapai 100% dari yang ditargetkan.

Adapun jika dibanding nominal capaian di tahun sebelumnya capaian di tahun 2022 secara nominal mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021 terdapat sebanyak 36 aduan pelanggaran HKI yang masuk dan ditangani dan pada tahun 2020 hanya terdapat 30 aduan pelanggaran HKI yang masuk. Jadi tolok ukur nominal permohonan aduan pelanggaran yang masuk tidak menjadi parameter dalam mengukur prestasi capaian kinerja karena jumlah aduan yang masuk lebih disebabkan faktor eksternal yaitu dari inisiatif masyarakat yang menyampaikan aduan pelanggaran atas HKI nya, mengingat delik yang dianut pada rezim penegakkan hukum KI adalah delik aduan. Sehingga tolok ukur capaian kinerja pada indikator penegakkan hukum KI adalah persentase penanganan dari jumlah aduan yang masuk di tahun bersangkutan yaitu 100%.

Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Nominal:30 aduan ditangani dari 30 aduan yang masuk	Nominal: 36 aduan ditangani dari 36 aduan yang masuk	Nominal:46 aduan ditangani dari 46 aduan yang masuk
Persentase: 100%	Persentase: 100%	Persentase: 100%

Sehingga capaian di tahun 2022 untuk output program di atas secara jumlah kumulatif melebihi capaian di banding tahun 2021 dan 2022. Capaian ini dapat terlaksana tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi, edukasi, dan himbaun yang lebih masif terkait pencegahan pelanggaran HKI sehingga dapat meningkatkan *awareness* masyarakat atas perlunya perlindungan HKI dan mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan atas pelanggaran HKI dalam hal terjadi dugaan atau kemungkinan terjadinya pelanggaran atas HKI kepada DJKI.

Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan jika capaian di tahun 2022 dibandingkan dengan proyeksi kedepan target di tahun 2023-2024 maka dengan asumsi positif capaian sebagaimana di tahun 2022

mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 dan 2020 maka secara asumsi optimis target di 2023 dan 2024 pun akan tercapai.

3) Capaian Perjanjian Kinerja DJKI 2022

Capaian kinerja DJKI berdasarkan dokumen perjanjian kinerja diambil dari capaian masing-masing Unit Eselon II DJKI yang berdasarkan Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Eselon II DJKI kepada Plt.Direktur Jenderal KI Tahun 2022. Berikut disajikan table capaian Perjanjian Kinerja DJKI tahun 2022.

Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi (output)	Target	Capaian	Pengampu (Unit Es.II)
Pembinaan/penyelenggaraan KI	Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	1. Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta	Persentase pencatatan hak cipta yang telah memperoleh kepastian hukum	100%	100%	Direktorat Hak Cipta & Desain Industri
		2. Persentase penyelesaian permohonan Desain Industri	Persentase permohonan desain industri yang telah memperoleh kepastian hukum	100%	61%	
		3.Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri	Persentase penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri yang dapat berupa : - Layanan hukum bidang Cipta dan desain industri - Keberatan atas putusan penolakan DI	100%	191%	

			- Panggilan sidang/pemberian keterangan sebagai saksi ahli			
Mewujudkan potensi Kekayaan Intelektual yang mempunyai nilai ekonomis	1. Persentase peningkatan permohonan KI	Persentase kenaikan permohonan KI (jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun berjalan (2022) dikurangi jumlah permohonan KI yang masuk di tahun baseline (2019) dibandingkan dengan Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun baseline (2019) dikali 100%)	15%	58,61%	Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI	
	2. Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI	Jumlah stakeholder yang diharapkan memiliki pemahaman terkait KI sebagai hasil dari kegiatan sosialisasi dan diseminasi terkait KI yang dilakukan oleh DJKI dalam rangka pemberdayaan kekayaan intelektual = capaian jumlah	60%	72%		

			stakeholder yang terdiseminasi- tersosialisasi di tahun 2022/ target stakeholder yang terdiseminasi- tersosialisasi di tahun 2022 x 100% = X% (X% x 60% = XX Stakeholder)			
Terlindungi merek dan Indikasi Geografis (IG) di seluruh Indonesia	1.Persentase merek dan IG yang dilindungi	Persentase peningkatan jumlah penyelesaian merek dan indikasi geografis (dari angka <i>baseline</i> di tahun dasar/tahun 2019)	15%	14,36%		
	2.Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait merek dan IG	Jumlah rekomendasi hukum yang diberikan kepada pihak yang meminta dibagi rekomendasi hukum yang diajukan pada tahun berjalan dikali 100%	100%	158,43%		
Terlindungi ya Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia	1.Persentase peningkatan Paten, DTLST,dan Rahasia Dagang yang dilindungi	Jumlah dokumen permohonan Paten, DTLST, dan RD yang memperoleh kepastian hukum di tahun 2022 dibagi Jumlah dokumen permohonan Paten, DTLST, dan RD yang	15%	73,70%		

			memperoleh kepastian hukum di tahun dasar/tahun baseline di 2019 x 100%			
		2.Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang	Jumlah rekomendasi hukum terkait Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang diberikan kepada pihak yang meminta dibagi rekomendasi hukum yang diajukan pada tahun berjalan dikali 100%	100%	168,33%	
Terwujudnya penanganan dan penyelesaian sengketa HKI yang optimal	1.Persentase penanganan aduan pelanggaran HKI	Jumlah penanganan atas aduan pelanggaran HKI selama tahun 2022 dibagi jumlah aduan atas pelanggaran HKI yang disampaikan kepada DJKI selama tahun 2022 dikali 100%	100%	100%		
	2.Persentase penyelesaian sengketa HKI secara optimal	Jumlah penyelesaian sengketa HKI di tahun berjalan tahun 2022 (baik melalui proses SP3 atau P21) dibagi jumlah kasus pelanggaran HKI yang masih berjalan dikali	70%	60,43%		

			100%			
	Terwujudnya sistem manajemen data informasi dan pelayanan KI berbasis IT yang sistematis, efektif, handal, dan berkelanjutan	Peningkatan layanan Teknologi Informasi KI yang aman dan handal	Persentase pemberian layanan Teknologi Informasi KI yang aman dan handal yang meliputi seluruh kegiatan layanan system informasi, pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual di tahun 2022	99.50%	99,50%	Direktorat Teknologi Informasi KI
	Meningkatnya kualitas dukungan manajerial dan teknis DJKI	1. Indeks Reformasi Birokrasi DJKI	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi DJKI Tahun 2022	82	99,01	Sekretariat DJKI
		2. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan DJKI	Nilai Indeks Survei IKM atas layanan DJKI Tahun 2022 (dalam skala indeks maksimum 4)	3,32	3,46	
		3. Nilai SAKIP DJKI dengan predikat 'Baik'	Nilai SAKIP DJKI Tahun 2022	80,5	84,35	
		4. Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA	Nilai SMART DJKI Tahun 2022 (dalam persentase)	93%	95%	
		5. Nilai IKPA DJKI Tahun 2022	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran DJKI Tahun 2022	80	87,76	

4) Penjelasan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja DJKI 2022

A) Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia (Pengampu Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri)

Memiliki SDM sejumlah 84 pegawai, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri telah mencatatkan capaian kinerja berdasarkan Sasaran Kegiatan pada tabel Perjanjian Kinerja DJKI tahun 2022 A.3 di atas adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase Penyelesaian Pencatatan Hak Cipta (target: 100%, capaian: 100%)

Formulasi pada penghitungan capaian atas Indikator sasaran kegiatan di atas adalah “Persentase pencatatan hak cipta yang telah memperoleh kepastian hukum” dengan target 100%. Adapun permohonan pencatatan hak cipta yang masuk selama tahun 2021 mencapai 83.078 dengan capaian pencatatan hak cipta yang telah memperoleh kepastian hukum sebanyak 83.810. Sehingga formulasi penghitungan persentase capaian adalah:

“Jumlah penyelesaian permohonan pencatatan hak cipta/pencatatan hak cipta yang telah memperoleh kepastian hukum di tahun berjalan (2022) dibagi jumlah permohonan pencatatan hak cipta yang masuk di tahun berjalan (2022) dikali 100%”

$$(117.083 : 117.083) \times 100\% = 1 \times 100\% = 100,00\%$$

Jumlah persentase capaian di atas telah memenuhi target penetapan persentase capaian yang ditetapkan untuk dicapai. Bahkan jumlah penyelesaian permohonan pencatatan hak cipta jauh melebihi dari jumlah permohonan yang masuk di tahun bersangkutan. Capaian di tahun 2021 juga mengalami peningkatan persentase capaian jika dibandingkan tahun 2020, dimana pada tahun 2020 terdapat permohonan hak cipta yang masuk sejumlah 57.184 dan penyelesaian permohonannya sebanyak 55.678 atau persentase capaiannya menyentuh angka 97,36%

Penyelesaian Permohonan Hak Cipta masuk tahun 2020	Persentase 2020	Penyelesaian Permohonan Hak Cipta masuk tahun 2021	Persentase 2021	Penyelesaian Permohonan Hak Cipta masuk tahun 2022	Persentase 2022
55.678	97,36%	83.810	100%	117.083	100%

Tren peningkatan permohonan dan penyelesaian permohonan hak cipta yang meningkat dari tahun ke tahun banyak dipengaruhi faktor optimalisasi teknologi informasi pada seluruh layanan KI online yang selalu dilakukan pengembangan dan inovasi. Terbaru adalah program POP-HC (Persetujuan Otomatis Permohonan Pencatatan Hak Cipta) sebagai salah satu program unggulan yang secara resmi diluncurkan di tahun 2022. Mengingat sistem persetujuan secara otomatis tersebut adalah langkah yang memang dinantikan. Sebenarnya Hak Cipta merupakan salah satu rezim KI Konvensional yang paling dahulu melakukan optimalisasi TI bagi pemberian layanannya, yang dimulai di tahun 2014 melalui e-Hak Cipta yang semula menelan waktu beberapa belas hari menjadi hanya kurang lebih 2 hari dan seterusnya berlanjut dengan fitur-fitur pengembangannya menjadi 1 hari dan terbaru adalah melalui POP-HC tersebut yaitu sistem otomasi yang secara otomatis diberikan persetujuan atas pencatatan hak cipta yang diajukan permohonan pencatatannya.

Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024
97,36%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan jika capaian di tahun 2022 dibandingkan dengan target di tahun 2023-2024 maka maka proyeksi capaian dikedua tahun mendatang tersebut dengan asumsi positif capaian sebagaimana di tahun 2022 mengalami peningkatan dari segi nominal dan mencapai target persentase 100% (jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya) maka secara asumsi optimis target di 2023 dan 2024 pun akan tercapai. Adanya jumlah peningkatan permohonan pencatatan hak cipta yang semakin banyak dari tahun ke tahun memang menjadi faktor utama dari terlampauinya target capaian tersebut. Dimana semakin tingginya kesadaran masyarakat akan perlunya hasil karya cipta dan kreasi mereka untuk diberikan perlindungan semakin menguat sebagai hasil masifnya sosialisasi diseminasi dan edukasi yang dilakukan kepada segenap lapisan masyarakat terutama melalui platform-platform media sosial yang jangkauan engagement dari audiensnya jauh luas dan dari segenap kalangan. Strategi komunikasi dan humas yang dilakukan DJKI juga berarti terbilang sukses diterima masyarakat.

2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase penyelesaian permohonan Desain Industri (target: 100%, capaian: 61%)

Formulasi pada penghitungan capaian atas IKK di atas adalah “Persentase permohonan pendaftaran desain industri yang telah Memperoleh Kepastian hukum” dengan target 100%. Adapun permohonan pendaftaran desain industri yang masuk selama tahun 2022 mencapai 4.877 permohonan dengan capaian penyelesaian permohonan pendaftaran desain industri sebanyak 2.469 dokumen permohonan yang mendapat kepastian hukum (daftar, tolak, ditarik kembali atau dianggap ditarik kembali). Sehingga penghitungan persentase capaian adalah:

“Jumlah penyelesaian permohonan pendaftaran desain industry yang telah memperoleh kepastian hukum di tahun berjalan (2022) dibagi target jumlah permohonan pendaftaran desain industri yang masuk di tahun berjalan (2022) dikali 100%”

$$(2.469 : 4.056) \times 100\% = 0,608 \times 100\% = \mathbf{61\%}$$

Penyelesaian Permohonan Desain Industri 2020	Persentase Capaian	Penyelesaian Permohonan Desain Industri 2021	Persentase Capaian	Penyelesaian Permohonan Desain Industri 2022	Persentase Capaian
3.270	82,43%	4.127	95,17%	2.469	61%

Capaian pada target IKK terkait penyelesaian permohonan Desain Industri pada tahun 2022 mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan capaian di tahun 2021 dimana capaian mencapai persentase 95,17%. Namun penurunan persentase capaian tersebut disebabkan karena terjadinya kenaikan permohonan Desain Industri di tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021. Selain itu penyelesaian Desain Industri pada tahun 2021 dan 2020 juga termasuk menghitung capaian penyelesaian permohonan *backlog* desain industry, sedangkan capaian di tahun 2022 murni penyelesaian permohonan yang tidak backlog (masih dalam jangka waktu sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan).

Selain itu adanya permohonan yang masuk di tahun 2022 yang belum mendapat kepastian hukum hingga periode tahun 2022 selesai dikarenakan permohonan yang

masuk tersebut masuknya pada triwulan terakhir pada tahun 2022 sehingga masih masuk dalam proses formalitas belum kepada tahap pemeriksaan substansif desain industri, maka belum mendapat kepastian hukum atas status permohonan pendaftaran desain industri tersebut.

Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024
82,43%	95,17%	61%	100%	100%

Melihat SDM Pemeriksa Desain Industri yang hanya berjumlah 25 orang pemeriksa sedangkan permohonan yang masuk sekitar 4.877 maka satu orang pemeriksa Desain Industri memiliki sekitar 195 dokumen permohonan Desain Industri yang harus diperiksa substantifnya, tentunya jumlah tersebut kurang ideal jika ingin mendapatkan hasil penyelesaian permohonan Desain Industri yang sesuai dengan target yang diharapkan (100%). Sehingga diperlukan adanya penambahan SDM Pemeriksa Desain Industri, mengingat proyeksi di tahun-tahun mendatang jumlah permohonan Desain Industri ada kemungkinan semakin meningkat, mengingat tren dari tahun 2022 pasca dilaksanakannya beberapa program unggulan DJKI seperti *Mobile IP Clinic* juga berdampak pada peningkatan permohonan KI termasuk permohonan DI serta optimalisasi penggunaan TI dalam layanan publik KI serta di tahun 2024 akan ditetapkan sebagai tahun tematik bagi Desain Industri.

3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri (target: 100%, capaian: 191%)

Pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri merupakan permohonan masyarakat terkait pemberian pendapat hukum di bidang hak cipta dan desain industri. Jumlah pelayanan hukum yang diberikan tergantung dari permintaan masyarakat yang masuk. Adapun komponen rekomendasi hukum terdiri dari: Layanan hukum bidang Cipta dan Desain Industri; Keberatan atas putusan penolakan Desain Industri; serta pemberian keterangan sebagai saksi ahli.

“Jumlah penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri di tahun

berjalan (2022) dibagi dengan target jumlah permohonan rekomendasi hukum yang masuk di tahun berjalan (2022) dikali 100%”

$$610: 320 \times 100\% = 191\%$$

Penyelesaian rekomendasi hukum Desain Industri masuk tahun 2020	Persentase Capaian	Penyelesaian rekomendasi hukum Desain Industri masuk tahun 2021	Persentase Capaian	Penyelesaian rekomendasi hukum Desain Industri masuk tahun 2022	Persentase Capaian
3.270	82,43%	4.127	95,17%	610	191%

Capaian pada tahun 2022 melampaui dari target yang ditetapkan. Capaian ini juga mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan tahun 2021 dan 2020). Adanya peningkatan capaian yang secara signifikan dipengaruhi oleh faktor optimalisasi penggunaan sarana pertemuan atau *meeting* secara daring misalnya dalam layanan bentuk pemberian keterangan saksi ahli dan lay. Pemberian rekomendasi hukum dan sebagainya dapat terus diberikan tidak terbentur pada kehadiran secara fisik. Selain itu mulai terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap urgensi perlindungan desain industry juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi tinginya jumlah permohonan rekomendasi hukum yang diterima DJKI.

B) Mewujudkan Potensi Kekayaan Intelektual yang Mempunyai Nilai Ekonomis (Pengampu Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI)

Mewujudkan Potensi KI yang Mempunyai Nilai Ekonomis merupakan sasaran kegiatan dari Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI yang memiliki jumlah pegawai sebanyak 36 orang (sudah termasuk 1 orang pejabat Eselon II yaitu Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI) selama tahun anggaran 2022. Adapun dari sasaran kegiatan pada table A.3 tersebut telah tercapai capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Peningkatan Permohonan KI (target:15%, capaian: 58,61%)

Jenis Layanan	Total Permohonan	Total Permohonan	Total Permohonan
---------------	------------------	------------------	------------------

	KI 2020	KI 2021	KI 2022
Cipta	57.814	83.078	117.083
DI	3.967	4.349	4.877
Merek & IG	116.571	103.667 (103.639 Merek, 28 IG)	120.242 (Merek: 120.216 IG: 26)
Paten	10.858	12.467	14.062
total	189.210	203.561	256.264

Jenis Layanan Total Permohonan KI 2019	
Cipta	42.768
DI	4.361
Merek&IG	101.830
Paten	12.606
total	161.565

Capaian pada IKK ini memiliki formulasi penghitungan berikut:

“Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun berjalan (2022) dikurang jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun dasar/tahun baseline (2019) dibagi jumlah permohonan KI tahun dasar/baseline (tahun 2019) dikali 100%.”

$$(256.264 - 161.565) : 161.565 \times 100\% = 94.699 : 161.565 = 0,5861 \times 100\% = \mathbf{58,61\%}$$

Capaian pada output program ini sebesar 58,61% jauh melebihi target yang ditetapkan untuk dicapai di tahun 2022 yaitu 15%. Adapun pada tahun 2021 terdapat peningkatan permohonan KI sebesar 21,45% jika dibandingkan tahun dasar/baseline di tahun 2019, dimana capaian tahun 2021 tersebut pun melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 12%. Sedangkan jika dilihat progress peningkatan permohonan KI yang masuk di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 terdapat peningkatan sebesar 25,89%, capaian ini juga jauh melampaui capaian peningkatan per tahun baik jika dibandingkan dengan peningkatan permohonan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 4,34% maupun dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang mencapai 17,11%.

Tahun	Target (%peningkatan berdasarkan tahun baseline: 2019)	Capaian %peningkatan permohonan KI (dibanding tahun baseline: 2019)	Capaian %peningkatan permohonan KI (dibanding tahun sebelumnya)
2020	7%	17,11%	N/A (2019 belum terdapat target capaian ini)
2021	12%	21,45%	4,34%
2022	15%	58,61%	25,89%

Adapun justifikasi dari terlampauinya target capaian kinerja dipengaruhi beberapa faktor, misalnya terkait dengan optimalisasi layanan TI pada seluruh layanan penerimaan permohonan KI secara online. Selain itu adanya berbagai program unggulan DJKI yang banyak melakukan diseminasi dan edukasi KI seperti Mobile IP Clinic, Yasonna Mendengar, DJKI Mengahar menjadikan tingkat animo masyarakat dalam mendaftarkan KI terutama dari rezim Hak Cipta dan Merek mengingat geliat pelaku ekonomi khususnya dari UMKM yang mulai bangkit pasca pandemic COVID-19 turut mempengaruhi peningkatan jumlah permohonan secara signifikan. Kiranya capaian ini juga dapat mencerminkan bahwa penyediaan layanan permohonan KI dapat dikatakan cukup dikenal dan memuaskan masyarakat pengguna layanan KI hal ini nanti dapat dilihat pada capaian yang terkait pada Indeks Kepuasan Masyarakat.

Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024
7%	17,11%	12%	21,45%	15%	58,61%	17%	20%

Sedangkan jika capaian di tahun 2022 dibandingkan dengan proyeksi kedepan target di tahun 2023-2024 maka dengan asumsi positif capaian sebagaimana di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 dan 2020 maka secara asumsi optimis target di 2023 dan 2024 pun akan tercapai hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan massif optimalisasi penggunaan teknologi informasi KI dalam proses pengajuan permohonan KI secara online untuk semua jenis KI dengan harapan

mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan KI pada umumnya dan membantu pemohon KI dalam mengajukan permohonan pendaftaran atau pencatatan KI-KIK. Selain itu efek dari pelaksanaan berbagai kegiatan dalam Program Unggulan seperti *Mobile IP Clinic* dalam menjangkau bola potensi permohonan KI domestik dalam bentuk kegiatan diseminasi informasi pemahaman dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat yang dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia bekerja sama dengan 33 Kanwil Kemenkumham, DJKI Mengajar, lalu *Patent Drafting* juga mendorong kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan KI.

2. Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Pelindungan KI (target: 60%, capaian: 72%)

Capaian pada IKK yang diampu oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 adalah Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya pelindungan KI adalah sebagai hasil formulasi dari jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi terkait KI yang dilakukan oleh DJKI dalam rangka pemberdayaan kekayaan intelektual yaitu:

“Capaian jumlah stakeholder yang terdiseminasi-tersosialisasi di tahun 2022 dibagi target stakeholder yang terdiseminasi-tersosialisasi di tahun 2022 x 60%”

$$\frac{(3.000 : 2.500) \times 100\%}{1,2} \times 60\% = 72\%$$

Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020 (nominal dan %)	Target tahun 2021 (nominal dan %)	Capaian tahun 2021	Target tahun 2022 (nominal dan %)	Capaian (nominal dan %)
1.000 (tahun 2020 sebagai tahun peralihan dari periode Renstra sebelumnya target tidak dalam %)	1.296 (129,6%)	2.500 (50%)	3.000 (60%)	2.500 (60%)	3.000 (72%)

Target persentase capaian IKK di atas pada tahun 2021 adalah 50%, sedangkan capaian pada tahun 2021 mencapai 60%. Sedangkan persentase capaian pada tahun 2022 menyentuh 72%. Terlampauinya target capaian tersebut mengindikasikan adanya peningkatan awareness masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual. Mengingat kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan tidak hanya prakarsa atau inisiatif dari DJKI, tapi juga dari stakeholder termasuk masyarakat umum yang mengundang DJKI untuk memberikan sosialisasi dan diseminasi KI.

Sedangkan capaian tahun 2022 belum bisa diproyeksikan untuk dibandingkan di tahun 2023 dan 2024 mengingat IKK ini tidak sama dengan IKK pada Sasaran Program pada Renstra, berbeda dengan IKK seperti persentase peningkatan permohonan atau persentase penyelesaian permohonan KI yang juga masuk dalam indikator sasaran program dalam Renstra DJKI sehingga bisa diproyeksikan dibandingkan dengan target target tahun-tahun berikutnya.

C)Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis (IG) di seluruh Indonesia (Pengampu oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis)

Memiliki SDM sejumlah 195 orang, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis telah mencatatkan capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja yang diampu oleh Dit.Merek&IG pada table A.3 di atas terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:

1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi (target: 15%, capaian:14,36%)

Capaian pada IKK dari indikator persentase Merek dan Indikasi Geografis yang dilindungi merupakan hasil dari persentase peningkatan jumlah penyelesaian Merek dan Indikasi Geografis (dari angka *baseline* di tahun dasar/tahun 2019) dengan formulasi penghitungan sebagai berikut:

“Selisih Jumlah Penyelesaian permohonan merek dan IG pada tahun berjalan (2022) dengan penyelesaian permohonan merek dan IG pada tahun dasar/baseline (2019) dibagi capaian pada tahun penyelesaian permohonan merek dan IG tahun dasar/baseline (2019) dikali 100%”

$$19.772 : 137.676 = 0,1436 \times 100\% = 14,36\%$$

Sehingga capaian pada IKK di atas di tahun 2022 adalah sebesar **14,36%**, dimana persentase capaian melebihi capaian di tahun 2021 (yaitu 13,19%), walaupun secara target di tahun 2022 masih belum sempurna mencapai persentase target yang ditentukan (15%).

Penyelesaian Permohonan Merek&IG Tahun 2019 (baseline)	Penyelesaian Permohonan Merek&IG Tahun 2021	Target Capaian 2021	Persentase capaian 2021	Penyelesaian Permohonan Merek&IG Tahun 2021	Target 2022	Capaian 2022
137.676	155.845	12%	13,19%	117.904 (117.887 Merek, 17 IG)	15%	14,36%

Angka penyelesaian permohonan Merek di tahun 2022 memang secara nominal lebih kecil jika dibandingkan dengan penyelesaian di tahun 2021. Namun angka penyelesaian di tahun 2021 juga banyak menyelesaikan permohonan backlog. Sedangkan di tahun 2022, angka backlog penyelesaian cenderung jauh berkurang sehingga angka penyelesaian permohonan Merek di tahun 2022 hanya melihat penghitungan penyelesaian merek yang non backlog (penyelesaian masih dalam jangka waktu sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan). Selanjutnya jika capaian tahun 2022 akan diproyeksikan untuk dibandingkan di tahun 2023 dan 2024 mengingat IKK ini tidak sama dengan IKK pada Sasaran Program pada Renstra, berbeda dengan IKK seperti persentase peningkatan permohonan atau persentase penyelesaian permohonan KI yang juga masuk dalam indikator sasaran program dalam Renstra DJKI sehingga bisa diproyeksikan dibandingkan dengan target tahun-tahun berikutnya.

2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Persentase Penyelesaian Rekomendasi Pelayanan Hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis (target: 100%, capaian: 158,43%)

Capaian pada IKK berupa Persentase penyelesaian rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis merupakan hasil formulasi penghitungan dari:

“Capaian jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan IG di tahun 2022 dibagi target jumlah permintaan rekomendasi pelayanan hukum di bidang merek dan IG yang masuk di tahun 2022 dikali 100%”

$$808: 510 \times 100\% = 1,5843 \times 100\% = \mathbf{158,43\%}$$

Adapun yang termasuk pelayanan hukum di bidang Merek dan IG terdiri dari beberapa pelayanan yaitu:

- Saksi Ahli = sebanyak 208 layanan;
- Gugatan Perkara Pembatalan = sebanyak 348 layanan;
- Gugatan perkara putusan KBM = 29 layanan;
- Gugatan TUN = sebanyak 3 layanan;
- Kasasi = sebanyak 148 layanan;
- Pelaksanaan pembatalan = sebanyak 23 layanan;
- Gugatan pembatalan ditolak = belum ada;
- Pendapat Hukum di bidang merek dan indikasi geografis = sebanyak 10 layanan;
- Gugatan perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) = sebanyak 4 layanan; serta
- Menyusun bahan hukum terkait Riset Mahasiswa = sebanyak 35 layanan.

Capaian pada tahun 2022 sebanyak 808 pemberian rekomendasi layanan memang mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang terdapat sejumlah 929 rekomendasi layanan yang diberikan atau sekitar 182,16% dari target (target: 510 layanan). Sedangkan jika capaian di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2020 maka capaian atas IKK ini di tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan tahun 2020 yang mencatatkan jumlah sebanyak 538 rekomendasi layanan (105,49%).

Capaian pada IKK ini sebenarnya bisa dibilang sangat bergantung pada inisiatif dari masyarakat sehingga dalam menentukan angka pasti dari penentuan target atas IKK ini seringkali capaiannya memang jauh deviasinya dari target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor tingginya animo atau inisiatif dari masyarakat dalam mengajukan permohonan layanan hukum di bidang merek.

Selanjutnya jika capaian tahun 2022 akan diproyeksikan untuk dibandingkan di tahun 2023 dan 2024 mengingat IKK ini tidak sama dengan IKK pada Sasaran Program pada Renstra, berbeda dengan IKK seperti persentase peningkatan permohonan atau persentase penyelesaian permohonan KI yang juga masuk dalam indikator sasaran program dalam Renstra DJKI sehingga bisa diproyeksikan dibandingkan dengan target tahun-tahun berikutnya.

D) Terlindunginya Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia (Pengampu: Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang)

Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang memiliki jumlah SDM sebanyak 161 orang (termasuk 1 Orang jabatan Eselon II yaitu Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang) memiliki sasaran kegiatan berupa ‘Terlindunginya Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia’ mencatatkan capaian kinerja dengan detil target dan capaian berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja yang diampu oleh Dit.Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang pada table A.3 di atas terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:

1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase peningkatan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang dilindungi (target: 15%, capaian: 73,70%)

Capaian pada IKK dari indikator persentase peningkatan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang dilindungi merupakan hasil dari formulasi penghitungan sebagai berikut:

“Jumlah penyelesaian permohonan Paten, DTLST, dan RD yang sesuai peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan (2022) dibagi target penyelesaian permohonan Paten, DTLST, dan RD yang sesuai peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan (2022) dikali 100%”

$$\frac{8.815}{11.960} = 0,7370 \times 100\% = \mathbf{73,70\%}$$

Pada tahun 2019 terdapat jumlah permohonan yang masuk sebanyak 12.606, di tahun 2020 terdapat penurunan yaitu hanya sekitar 10.858 permohonan Paten, dan di 2021 sedikit mengalami kenaikan namun yaitu 12.473 dan tahun 2022 terdapat permohonan Paten yang masuk sebanyak 14.062. Terlihat bahwa di tahun 2022 permohonan Paten mengalami kenaikan cukup signifikan jika dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya, namun capaian penyelesaian di tahun 2022 memang masih berada di bawah capaian tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Paten merupakan jenis KI yang sejak tahun 2022 sudah tidak memiliki dokumen backlog lagi, sehingga perhitungan penyelesaian permohonan Paten sudah tidak termasuk penyelesaian backlog lagi. Sedangkan jika capaian tahun 2022 akan diproyeksikan untuk dibandingkan di tahun 2023 dan 2024 mengingat IKK ini tidak sama dengan IKK pada Sasaran Program pada Renstra maka tidak bisa dilakukan perbandingan. Berbeda dengan IKK seperti persentase peningkatan permohonan atau persentase penyelesaian permohonan KI yang juga masuk dalam indikator sasaran program dalam Renstra DJKI sehingga bisa diproyeksikan dibandingkan dengan target tahun-tahun berikutnya.

2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase penyelesaian rekomendasi pelayanan hukum terkait Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang (target:100%,capaian 168,33%)

Capaian atas IKK berupa persentase penyelesaian rekomendasi pelayanan hukum terkait Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang merupakan hasil formulasi penghitungan dari:

“Capaian jumlah pemberian rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di tahun 2022 dibagi target jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di tahun 2022 dikali 100%”

$$202: 120 \times 100\% = 168,33\%$$

Adapun persentase capaian tersebut adalah termasuk pelayanan hukum di bidang Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang terdiri dari beberapa pelayanan yaitu: Permintaan terkait riset akademisi;Tanggapan PK; Litigasi (pengadilan); Gugatan TUN; Permintaan saksi ahli; serta Pendapat hukum lain-lain.

Capaian pada tahun 2022 telah melampaui target yang ditentukan (100%).Namun capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan capaian di tahun 2021 (234 layanan) mengalami penurunan jika dibanding capaian di tahun 2020 yang mencapai 324 layanan. Capaian tahun 2022 mengalami sedikit penurunan dalam

jumlah layanan mengingat layanan hukum tersebut sangat tergantung kepada permohonan layanan hukum yang diajukan dari masyarakat.

Sedangkan jika capaian tahun 2022 akan diproyeksikan untuk dibandingkan di tahun 2023 dan 2024 mengingat IKK ini tidak sama dengan IKK pada Sasaran Program pada Renstra maka tidak bisa dilakukan perbandingan. Berbeda dengan IKK seperti persentase peningkatan permohonan atau persentase penyelesaian permohonan KI yang juga masuk dalam indikator sasaran program dalam Renstra DJKI sehingga bisa diproyeksikan dibandingkan dengan target tahun-tahun berikutnya.

E) Terwujudnya penanganan dan penyelesaian sengketa HKI yang optimal (Pengampu: Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa)

Memiliki SDM sejumlah 35 orang (termasuk 1 orang Pejabat Eselon II), Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI telah mencatatkan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut. Pencapaian Perjanjian Kinerja DJKI terkait dengan tugas yang diampu oleh Dit.Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:

1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :Persentase penanganan aduan pelanggaran HKI (target: 100%, capaian: 100%)

Capaian pada IKK ini memiliki formulasi penghitungan sebagai berikut:

“Jumlah aduan pelanggaran HKI yang ditangani/ditindaklanjuti di tahun berjalan (2022) dibagi dengan jumlah aduan pelanggaran HKI yang masuk di tahun berjalan (2022)X 100%”

Pada tahun 2022 terdapat 46 aduan pelanggaran HKI yang ditangani atau ditindaklanjuti dibagi jumlah aduan pelanggaran yang masuk di tahun 2022 yaitu terdapat 46 (empat puluh enam) sehingga formulasi penghitungan capaian output program di atas adalah:

$$46 : 46 \times 100\% = 100\%$$

Komponen pelanggaran HKI yang ditangani/ditindaklanjuti terdiri dari penyelesaian perkara sebanyak 25 aduan pelanggaran dan 34 permohonan mediasi yang dilakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian atas output program penanganan aduan pelanggaran HKI telah mencapai hasil yang optimal pada tahun 2022 yaitu mencapai 100% dari yang ditargetkan.

Adapun jika dibanding nominal capaian di tahun sebelumnya capaian di tahun 2022 secara nominal mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021 terdapat sebanyak 36 aduan pelanggaran HKI yang masuk dan ditangani dan pada tahun 2020 hanya terdapat 30 aduan pelanggaran HKI yang masuk. Jadi tolok ukur nominal permohonan aduan pelanggaran yang masuk tidak menjadi parameter dalam mengukur prestasi capaian kinerja karena jumlah aduan yang masuk lebih disebabkan faktor eksternal yaitu dari inisiatif masyarakat yang menyampaikan aduan pelanggaran atas HKI nya, mengingat delik yang dianut pada rezim penegakkan hukum KI adalah delik aduan. Sehingga tolok ukur capaian kinerja pada indikator penegakkan hukum KI adalah persentase penanganan dari jumlah aduan yang masuk di tahun bersangkutan yaitu 100%.

Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Nominal:30 aduan ditangani dari 30 aduan yang masuk	Nominal: 36 aduan ditangani dari 36 aduan yang masuk	Nominal:46 aduan ditangani dari 46 aduan yang masuk
Persentase: 100%	Persentase: 100%	Persentase: 100%

Sehingga capaian di tahun 2022 untuk IKK di atas secara jumlah kumulatif melebihi capaian di banding tahun 2021 dan 2022. Capaian ini dapat terlaksana tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi, edukasi, dan himbaun yang lebih masif terkait pencegahan pelanggaran HKI sehingga dapat meningkatkan *awareness* masyarakat atas perlunya perlindungan HKI dan mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan atas pelanggaran HKI dalam hal terjadi dugaan atau kemungkinan terjadinya pelanggaran atas HKI kepada DJKI.

Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan jika capaian di tahun 2022 dibandingkan dengan proyeksi kedepan target di tahun 2023-2024 maka dengan asumsi positif capaian sebagaimana di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 dan 2020 maka secara asumsi optimis target di 2023 dan 2024 pun akan tercapai.

2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase penyelesaian sengketa HKI secara optimal (target:70%, capaian: 60,43%)

Capaian dari IKK ini berupa persentase penyelesaian sengketa HKI yang memiliki 2 (dua) jenis cakupan, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi (mediasi). Adapun kedua jenis cakupan capaian tersebut adalah sebagai berikut: penyelesaian melalui rangkaian proses litigasi (**SP3 dan P21**) dan melalui upaya non litigasi yaitu mediasi. Penyelesaian melalui mediasi termasuk pada perkara yang sukses berhasil didamaikan maupun perkara yang menemui keputusan yang *deadlock*/tidak dapat didamaikan melalui mediasi. Adapun proses penyelesaian mediasi yang sudah dalam tahap selesai di tahun 2022 adalah sebanyak 30 perkara mediasi. Sedangkan di tahun 2021 terdapat sebanyak **16 perkara yang dilakukan mediasi (baik dalam prose sebanyak 10 perkara dan 6 perkara sudah selesai melalui mediasi (ada 2 yang berhasil dan 4 yang lanjut melalui litigasi))**.

Adapun formulasi penghitungan bagi IKK ini adalah:

“Jumlah penyelesaian perkara (litigasi sebanyak 25 dan mediasi sebanyak 30) di tahun 2022 dibagi dengan jumlah perkara yang masih dalam proses penyelesaian hingga tahun 2022 dikali 100%”

$$(25+30) : 91 \times 100\% = (55:91) \times 100\% = \mathbf{60,43\%}$$

Perkara Yang Masuk Tahun 2019 – 2022 Dan Statusnya Di Tahun 2022

Tahun	Status di tahun 2019- 2021					Status di tahun 2022		
	SP3	Proses Wasmat	SP2HW	Naik sidik	P21	SP3 Wasmat	P21	SP3 Penyidikan
2019	11	3	23	7	2	-	-	6
2020	7	14	5	4	-	4	-	2
2021	1	6	24	5	-	10	-	
						1	-	2
Total	18	23	52	16	2	15	-	10

Total Perkara yang masih dalam proses dari 2019-2022	Total Penyelesaian Perkara tahun 2022
91 perkara	25

Upaya penyelesaian melalui non litigasi (melalui mediasi):

Jumlah permohonan mediasi tahun 2022	Pelaksanaan Mediasi tahun 2022 (data Evaluasi Kinerja Semester II 2022)
34	30

Upaya Penegakan Hukum lainnya

Jumlah situs yang ditutup selama tahun 2022; Total = 187 situs / URL

Jenis Kekayaan Intelektual	Jumlah
Hak Cipta	21
Merek	10
Desain Industri	3

Sedangkan jika capaian tahun 2022 akan diproyeksikan untuk dibandingkan di tahun 2023 dan 2024 mengingat IKK ini tidak sama dengan IKK pada Sasaran Program pada Renstra maka tidak bisa dilakukan perbandingan. Berbeda dengan IKK seperti persentase peningkatan permohonan atau persentase penyelesaian permohonan KI yang juga masuk dalam indikator sasaran program dalam Renstra DJKI sehingga bisa diproyeksikan dibandingkan dengan target tahun-tahun berikutnya.

F) Terwujudnya sistem manajemen data informasi dan pelayanan KI berbasis IT yang sistematis, efektif, handal, dan berkelanjutan (Pengampu Direktorat Teknologi Informasi KI) (Target: 99,50% Capaian: 99,50%)

Memiliki SDM sejumlah 40 (empat puluh) orang (termasuk 1 orang pejabat Eselon II) Direktorat Teknologi Informasi KI telah mencatatkan capaian kinerja berdasarkan IKK pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebanyak 99,50%. Dimana capaian pada tahun 2022 telah memenuhi target yang ditentukan yaitu 99,50% adapun penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut.

Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penyelenggaraan Sistem TI KI	Peningkatan Layanan TI KI Yang Aman dan Handal	99,50 %	99,25 %

Peningkatan Layanan TI KI Yang Aman dan Handal

Penetrating Testing dan Vulnerability Testing untuk keamanan aplikasi DJKI	100 %
Perbaikan Perangkat Hardware dan Optimalisasi Layanan Pemeliharaan Infrastruktur TI.	100 %
Pemantauan Sistem Keamanan Jaringan DJKI/terdeteksi malware	99 %
Monitoring aplikasi kekayaan intelektual	98 %
Pembahasan Aplikasi dalam rangka pendampingan penggunaan aplikasi.	100 %
Penyediaan data statistik dan database yang <i>update</i> (3746 kegiatan)	98 %
Layanan Portal Web 24 jam 7 hari	99,8%

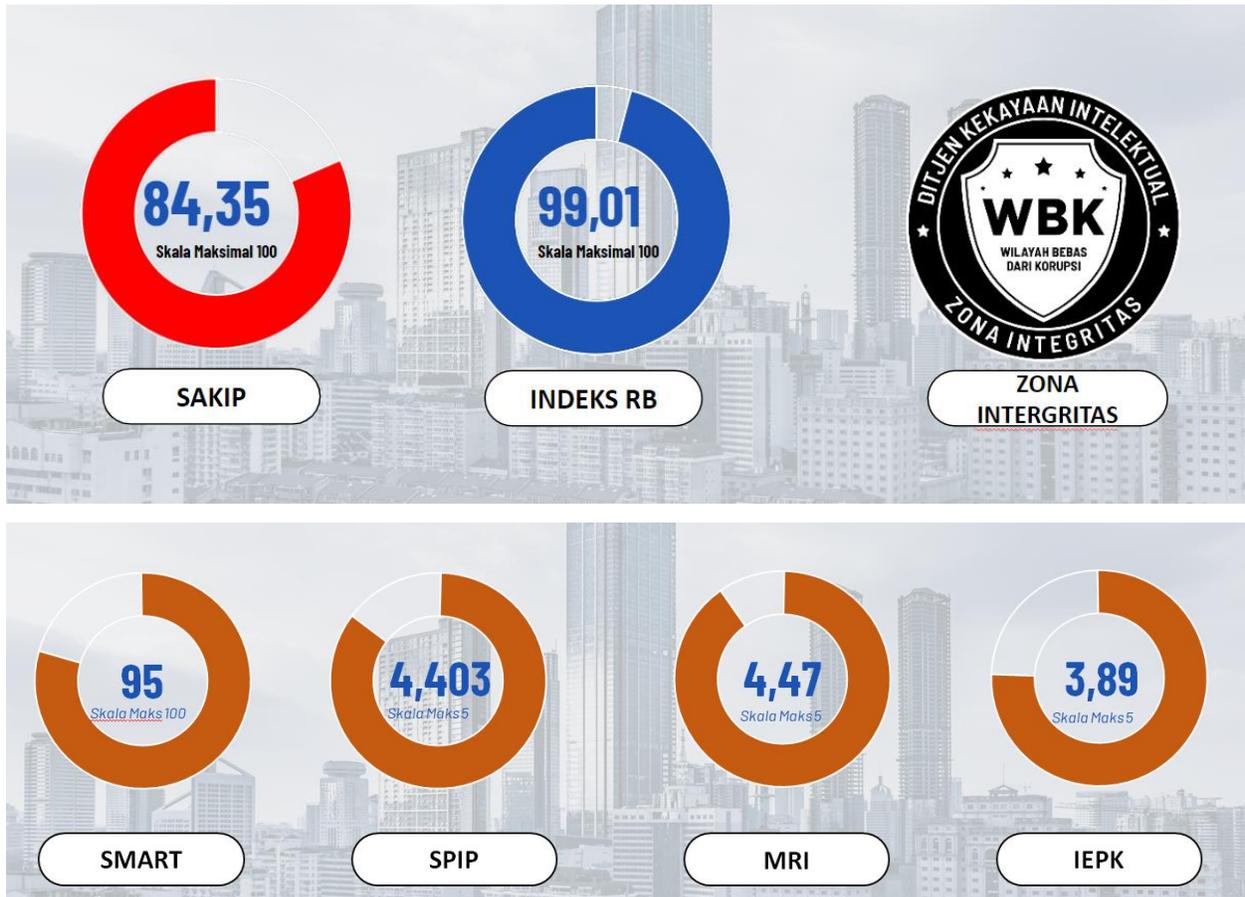


Sedangkan jika capaian tahun 2022 akan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka tidak bisa, mengingat tiap tahunnya penentuan target atau fokus prioritas dukungan teknolog informasi berbeda-beda dan sifat kegiatannya adalah proses bukan output pecahan yang bisa berdiri sendiri. Selain itu jika capaian di tahun 2022 diproyeksikan untuk dibandingkan di tahun 2023 dan 2024 mengingat IKK ini tidak sama dengan IKK pada Sasaran Program pada Renstra maka tidak bisa dilakukan perbandingan. Berbeda dengan IKK seperti persentase peningkatan permohonan atau persentase penyelesaian permohonan KI yang juga masuk dalam indikator sasaran program dalam Renstra DJKI sehingga bisa diproyeksikan dibandingkan dengan target tahun-tahun berikutnya.

G) Meningkatkan kualitas dukungan manajerial dan teknis DJKI (Pengampu Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki tugas dan fungsi sebagai unit Eselon II yang berperan sebagai supporting Unit dimana tugasnya adalah memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jumlah SDM di Sekretariat DJKI berjumlah 150 orang ASN (termasuk satu orang Pejabat Eselon II yaitu Sekretaris

DJKI). Untuk pelaksanaan kegiatan di Tahun 2022 Sekretariat mempunyai tugas yaitu Program dukungan Manajemen dan teknis lainnya dengan IKK berupa ‘**Meningkatnya kualitas dukungan manajerial dan teknis DJKI**’ seperti tertuang di Perjanjian Kinerja DJKI 2022. Adapun capaian dari IKK tersebut antara lain sebagai berikut.



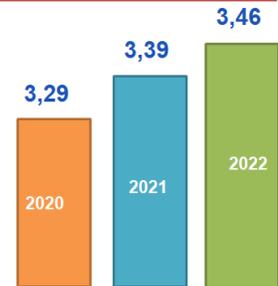
KOMPOSISI & REALISASI SAMPEL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Tahun 2022

Survei ini menargetkan **800** responden, namun pada pelaksanaannya berhasil mendapatkan sebanyak **1.162 responden**. Jumlah responden terbanyak yakni **Jawa Timur dan DKI Jakarta**. Hal ini sejalan dengan jumlah pemohon yang memang lebih banyak pada wilayah tersebut.

- Kenaikan IKM pertiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2020 s.d 2022,
- di tahun 2023 akan dilakukan ke seluruh 33 Kantor Wilayah
- IKM dilakukan untuk Mengukur Indeks Kepuasan Pelanggan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tiap *triwulan, semester dan Indeks total tahun 2022*.

Skor Total Net Promoter Score (NPS) DJKI adalah 76,3% dan masuk kategori World Class

No.	KANWIL	POPULASI (DATABASE CLEAN)	PROPORSI	TARGET RESPONDEN	REALISASI PEROLEHAN RESPONDEN	PERSENTASE REALISASI
1	Sumatera Utara (Barat)	2.030	5,3%	30	33	110,0%
2	Sumatera Selatan (Barat)	1.361	3,6%	30	88	293,3%
3	Riau (Barat)	1.094	2,9%	30	30	100,0%
4	DKI Jakarta (Barat)	9.524	25,0%	150	158	105,3%
5	Jawa Tengah (Barat)	5.443	14,3%	100	124	124,0%
6	Jawa Timur (Barat)	13.063	34,3%	270	424	157,0%
7	Bali (Tengah)	2.906	7,6%	70	132	188,6%
8	Sulawesi Tenggara (Tengah)	644	1,7%	30	48	160,0%
9	Sulawesi Selatan (Tengah)	1.545	4,1%	30	43	143,3%
10	Maluku Utara (Timur)	162	0,4%	30	39	130,0%
11	Papua (Timur)	344	0,9%	30	43	143,3%
Total		38.116	100,0%	800	1162	145,3%



CAPAIAN KINERJA PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2022

- 1 MOBILE IP CLINIC**
 - 44 Mall Pelayanan Publik
 - Terciptanya Kolaborasi Layanan KI antara DJKI, Kanwil dan Pemda/Stakeholders
 - Peningkatan Permohonan KI 33,32%
- 2 ISO 9001:2015**
 - Terlaksananya Pelaksanaan Training Tentang Pemahaman Standar Manajemen Mutu
 - Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
 - Workshop Penyusunan Manajemen Resiko
- 3 ISO 37001:2016**
 - Meraih Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan hasil Nihil Temuan
- 4 PNBP BERKEADILAN**
 - Penetapan PERMENKUMHAM tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara pengenaan tarif Rp 0,- (nol Rupiah) atau 0% (nol Persen) (Rapermen masih dalam tahap Pembahasan secara Internal)
- 5 MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR & LAYANAN DJKI KOLABORASI ANTAR ULP**
 - Seluruh paket pengadaan TA 2023 sudah terinput kedalam aplikasi SiRUP di Bulan Oktober–November 2022
 - Percepatan Pbj DJKI sesuai jadwal RUP
- 6 DJKI MENGAJAR**
 - Dilaksanakan serentak pada 33 provinsi
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat arti pentingnya Kekayaan Intelektual



- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2022 :
1. Monev Capaian Perjanjian Kinerja
 2. Monev Capaian Target Kinerja Pusat dan Target Kinerja Pusat dan Kanwil dari B01 s.d B12 mendapatkan nilai hijau (nilai 100)
 3. Laporan penerapan SPIP
 4. Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada 11 Kantor Wilayah
 5. Laporan Perbulan dari masing-masing Direktorat
 6. Penyusunan Manaiemen Risiko DJKI

I. Peningkatan Citra DJKI

a. Pemberitaan KI melalui Media



23.950 Pemberitaan

b. Pembuatan Media HKI

c. DJKI Mengajar



DJKI Mengajar diikuti oleh lebih dari 500- siswa SD dan SMP serta distreaming lebih dari 2.326 kali.



Media HKI Tahun 2022 telah terbit sebanyak 3 edisi

II. Keterbukaan Informasi

b. Layanan Informasi



c. Pengaduan Layanan



B. Realisasi Anggaran

1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Kekayaan Intelektual Tahun 2022

Dalam teori keuangan negara, PNBP merupakan sektor penerimaan negara yang terkait dengan layanan masyarakat tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang dikenal dengan istilah *revenue dominial*, yaitu merupakan penerimaan negara yang pada hakekatnya bersumber dari semua milik negara, termasuk di dalamnya kekuasaan atau kewenangan tertentu yang dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan penerimaan negara. Penerimaan negara ini dapat berasal dari hasil pemberian fasilitas atau izin kepada kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu. Oleh karena itu, penerimaan jenis ini berada di berbagai Kementerian/Lembaga tergantung pada tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan salah satu Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM yang menghasilkan PNBP melalui layanan hukum di bidang Kekayaan Intelektual.

Dapat dikatakan dari rentang tahun anggaran 2019-2022 terdapat sedikit penurunan dari penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual. Adapun realisasi penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh DJKI kepada masyarakat pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 805.681.673.387,00 (delapan ratus lima miliar enam ratus delapan

puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sekitar 94,78% dari target PNBPN tahun 2022 Rp. 850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah). Berikut perbandingan penerimaan PNBPN DJKI dalam periode 2019-2022:

Tahun Anggaran	Target PNBPN	Realisasi PNBPN	Persentase
2019	Rp. 500.000.000.000,00	Rp. 714.606.483.255, 00	142,92%
2020	Rp. 608.500.000.000,00	Rp. 789.869.148.000,00	129,80%
2021	Rp. 800.000.000.000,00	Rp. 833.523.379.669,00	104,19%
2022	Rp 850.000.000.000,00	Rp 805.681.673.387,00	94,78%

Berdasarkan table penerimaan PNBPN di atas, capaian realisasi nominal PNBPN pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya mengalami sedikit penurunan. Kondisi ini terjadi dikarenakan adanya beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Adanya penurunan penerimaan atas Biaya (Jasa) Tahunan Paten meskipun dari segi banyaknya paten yang dibayarkan meningkat. Penurunan atas Biaya (jasa) tahunan paten ini disebabkan oleh:
 - a. Mulai banyak Perguruan Tinggi yang mengajukan Tarif Tertentu;
 - b. Transisi ke Aplikasi Baru (SAKI) dari 2 Aplikasi lama (IPAS dan IPROLINE) mempengaruhi kinerja. Saat ini Aplikasi SAKI masih terus disempurnakan sesuai kebutuhan;
 - c. Di tahun-tahun sebelumnya kemungkinan terdapat pembayaran Biaya (jasa) tahunan paten multiyear.
2. Adanya peralihan Aplikasi pada layanan Desain Industri dari Aplikasi IPROLINE ke Aplikasi SAKI yang mempengaruhi kinerja pemeriksa. Saat ini Aplikasi SAKI masih terus disempurnakan sesuai kebutuhan.
3. Adanya penurunan penerimaan atas Piutang PNBPN dibanding tahun – tahun sebelumnya karena belum ada lagi kebijakan untuk mendukung pemegang paten melakukan pembayaran utangnya. Pelunasan piutang dengan program keringanan utang (crash program) juga mempengaruhi besarnya realisasi penerimaan piutang PNBPN.

4. Adanya fluktuasi yang signifikan terhadap penerimaan Merek Internasional dibandingkan di tahun 2021 karena tahun 2021 dilakukan penyetoran Penerimaan Merek Internasional secara kumulatif.
5. Kesalahan pemohon dalam melakukan pemilihan jenis layanan yang mengakibatkan terjadinya pengembalian PNBPN yang langsung mengurangi realisasi PNBPN tahun berjalan.

2) Realisasi Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2022

Selama tahun 2022 telah terlaksana penyerapan anggaran sebesar Rp 485.987.311.076,00(atau sekitar **83,43%**) dari alokasi DIPA anggaran Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual tahun anggaran 2022 yaitu sejumlah Rp 582.450.099.000,00. Persentase penyerapan anggaran tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan persentase capaian penyerapan anggaran di tahun 2021 (**81,79%**). Sedangkan jika dibandingkan tahun 2020 maka realisasi penyerapan anggaran memang sedikit berkurang dimana tahun 2020 mencatatkan realisasi penyerapan anggaran sebesar **92,73%** dari alokasi DIPA anggaran program penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di tahun anggaran 2020 sejumlah Rp. 328.912.477.796,00.

Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Persentase
2020	Rp 355.309.753.000,00	Rp 328.912.477.796,00	92,73%
2021	Rp 521.193.591.000,00	Rp 427.243.346.148,00	81,79%
2022	Rp 582.450.099.000,00	Rp 485.987.311.076,00	83,43%

Namun secara nominal realisasi penyerapan anggaran di tahun 2022 memiliki jumlah yang lebih besar yaitu sebesar Rp 485.987.311.076,00, juga secara nominal capaian di 2022 lebih besari dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sejumlah Rp 427.243.346.148,00. Adanya peningkatan penyerapan realisasi anggaran tahun 2022 jika dibanding tahun 2021 disebabkan adanya berbagai program dan kegiatan yang cukup masif dan berkesinambungan seperti dalam Program Unggulan DJKI 2022 (misalnya melalui Mobile IP Clinic, Yasonna Mendengar, DJKI Mengajar, Patent Drafting Camp dan berbagai program dan kegiatan yang secara masif melibatkan berbagai stakeholder). Sedangkan adanya hambatan dalam

merealisasikan penyerapan anggaran dikarenakan beberapa pengadaan terkait Teknologi Informasi yang tidak jadi terealisasi karena terjadi beberapa kali proses lelang dan hingga memasuki triwulan terakhir tahun 2022 baru mendapatkan calon pemenang lelang sehingga terlalu berisiko (secara tertib administrasi dan tertib aturan) jika kegiatan pengadaan TI tersebut yang notabene dalam jumlah nominal besar jika tetap akan dilaksanakan di sisa tahun anggaran 2022 sehingga faktor inilah yang cukup banyak mempengaruhi optimalnya penyerapan anggaran DJKI tahun 2022.

C. Capaian Kinerja Anggaran

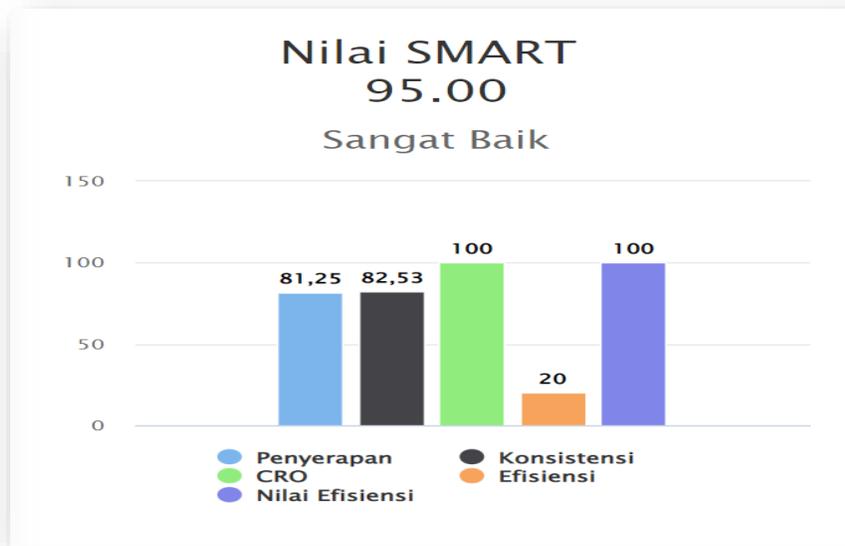
Capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%. Adapun nilai SMART DJA dilihat dari nilai kinerja smart DJA adalah **95%**. Nilai IKPA DJKI adalah **87,76** (DJKI sebagai Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM). Sehingga persentase dari capaian kinerja anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai SMART} = 95 \times 60\% = 57\%$$

$$\text{Nilai IKPA} = 87,20 \times 40\% = 34,88\%$$

Total nilai capaian kinerja anggaran DJKI pada tahun anggaran 2022 adalah
 $57\% + 34,88\% = \mathbf{91.88\%}$

Nilai SMART Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022 (per 5 Januari 2023)



Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	01307	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	Nilai	100.00	50.64	77.04	92.73	91.35	89.05	100.00	99.89	87.76	100%	87.76
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	5.06	15.41	9.27	9.14	8.91	5.00	24.97			
			Nilai Aspek	75.32		90.03					99.89			

Sedangkan jika dibandingkan dengan nilai SMART dan IKPA pada tahun anggaran 2021 maka capaian tahun 2022 mengalami peningkatan, walaupun jika dibandingkan tahun 2020 capaian di tahun 2022 mengalami penurunan. Adanya penurunan capaian tersebut banyak di pengaruhi oleh faktor berkurangnya nilai penyerapan DJKI pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2020 sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub-sub bab sebelumnya.

Tahun Anggaran	Nilai SMART	Nilai IKPA	% Nilai Capaian Anggaran
2020	98,55	94,78	97,04%
2021	92,29	85,22	89,46%
2022	95	87,76	91,88%

Adapun jika realisasi anggaran berdasarkan per jenis kegiatan maka ditampilkan capaian sebagai berikut.

Kegiatan	KRO	TVKRO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
1591 Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	1	1.131.845.000	1.055.111.151
1592 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (Rekomendasi Kebijakan)	1	617.650.000	569.657.314
1592 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	AEC Kerja sama (Kesepakatan)	12	10.015.153.000	7.223.917.190
1592 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	1	1.813.732.000	1.285.395.698
1592 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	2.500,00	18.075.315.000	14.797.732.472
1592 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	QMA Data dan Informasi Publik (layanan)	33	1.000.000.000	756.851.503
1593 Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (Rekomendasi Kebijakan)	510	1.508.495.000	1.414.655.895
1593 Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	2	2.505.279.000	2.487.174.551
1593 Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan)	86.262,00	1.909.776.000	1.848.168.138
1593 Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	BCE Penanganan Perkara (Perkara)	520	2.521.972.000	2.500.323.260

D. Capaian Kinerja Lainnya

1) Program Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2021 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 yang diampu oleh masing-masing unit eselon I salah satunya Direktorat Jenderal Kekayaan yang mengampu 12 (Dua Belas) target kinerja dengan capaian untuk kedua belas target kinerja di 12 bulan pelaksanaan tarja mencapai nilai hijau full (100) dengan rincian sebagai berikut:

No	Target Kinerja	Target	Data Dukung	Nilai Capaian
1	Melaksanakan Tahun Hak Cipta di 6 Provinsi	B01-B03 :Laporan pelaksanaan rangkaian kegiatan Tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta	Laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta di wilayah Banten	100
		B04-B06 : Laporan pelaksanaan rangkaian kegiatan Tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta Triwulan II	Laporan pelaksanaan rangkaian kegiatan Tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta Triwulan II	100
		B07-B09 : : Laporan pelaksanaan rangkaian kegiatan Tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta Triwulan III	Laporan pelaksanaan rangkaian kegiatan Tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta Triwulan III	100
		B12 : Laporan pelaksanaan rangkaian kegiatan Tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta Triwulan IV	Laporan pelaksanaan rangkaian kegiatan Tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta Triwulan IV	100
2	Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI pada 5 Provinsi	B02-B03 : Persiapan dan Pelaksanaan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI. Pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan KI	Laporan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI.Laporan Pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan KI	100

		B04-B06 : Pelaksanaan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI	Laporan pelaksanaan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI	100
		B08-B09 : Pelaksanaan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI	Laporan pelaksanaan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI	100
		B10-B12 : B10: Sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI; B11: Evaluasi pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan KI; B12: Laporan pelaksanaan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI Tahun 2022 dan Rencana Kerja 2023.	Laporan terkait pelaksanaan kegiatan pemahaman kalsifikasi barang dan jasa (umum/tradisional) pada Kanwil kemenkumham; Laporan pelaksanaan monev pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan KI; Laporan hasil pelaksanaan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI Tahun 2022 dan rencana kerja 2023.	100
3	Meningkatkan standar kualitas layanan kekayaan intelektual melalui ISO 9001 2015	B01-B03 : B01: Rapat rencana pelaksanaan ISO 9001 2015; B02: Penyusunan Tim Kerja ISO 9001:2015 B03: Sosialisasi penerapan ISO 9001:2015 pada layanan KI	B01: Laporan rencana pelaksanaan ISO 9001 2015; B02: SK Tim ISO 9001:2015 B03: Laporan pelaksanaan Sosialisasi penerapan ISO 9001:2015 pada layanan KI.	100
		B04-B06: B04: Inventarisasi kebutuhan pelaksanaan sertifikasi ISO 9001 2015 B05-B06: Pelatihan sertifikasi ISO 9001 2015	B04: Laporan inventarisasi kebutuhan pelaksanaan sertifikasi ISO 9001 2015 B05-B06: Laporan Pelatihan sertifikasi ISO 9001 2015	100

		<p>B07-B09: B07: Penyusunan rencana audit ISO 9001 2015; B08-B09: Pelaksanaan perbaikan Sistem layanan/SDM/ dan infrastruktur dalam rangka audit ISO 9001 2015</p>	<p>B07: Laporan rencana audit ISO 9001 2015; B08-B09:Laporan perbaikan Sistem layanan/SDM/ dan infrastruktur dalam rangka audit ISO 9001 2015</p>	100
		<p>B10-B12: B10: Pelaksanaan perbaikan Sistem layanan/SDM/ dan infrastruktur dalam rangka audit ISO 9001 2015 B11-B12: Pelaksanaan pemenuhan dokumentasi persiapan audit ISO 9001 2015</p>	<p>B10: Laporan perbaikan Sistem layanan/SDM/ dan infrastruktur dalam rangka audit ISO 9001 2015; B11-B12: Laporan dokumentasi persiapan audit ISO 9001 2015</p>	100
4	Penyelesaian Permohonan Cipta sesuai 100%	<p>B01-B03 : Penyelesaian permohonan Hak Cipta 100%</p>	Laporan Penyelesaian permohonan Hak Cipta 100% (per bulan, per triwulan)	100
		<p>B04-B06 : Penyelesaian permohonan Hak Cipta 100%</p>	Laporan Penyelesaian permohonan Hak Cipta 100% (per bulan, per semester kesatu)	100
		<p>B07-B09 : Penyelesaian permohonan Hak Cipta 100%</p>	Laporan Penyelesaian permohonan Hak Cipta 100% (per bulan, per triwulan)	100
		<p>B10-B12 : Penyelesaian permohonan Hak Cipta 100%</p>	Laporan Penyelesaian permohonan Hak Cipta 100% (per bulan, per triwulan/per semester kedua)	100
5	Penyelesaian tunggakan	<p>B01-B03: B01: Penyelesaian</p>	B01-B03:Laporan	

permohonan Kekayaan Intelektual	tunggakan permohonan merek 7000 dokumen, desain industry 15 dokumen B02: Penyelesaian tunggakan permohonan merek 8000 dokumen, desain industry 15 dokumen B03: Penyelesaian tunggakan permohonan merek 15000 dokumen, desain industry 15 dokumen	penyelesaian tunggakan permohonan Merek dan Desain Industri B01, B02, dan B03	100
	B04-B06: B04: Penyelesaian tunggakan permohonan desain industry 15 dokumen B05: Penyelesaian tunggakan permohonan desain industry 15 dokumen B06: Penyelesaian tunggakan permohonan desain industry 15 dokumen	B04-B06:Laporan penyelesaian tunggakan permohonan Desain Industri B04, B05, dan B06	100
	B07-B09: B07: Penyelesaian tunggakan permohonan desain industry 15 dokumen B08: Penyelesaian tunggakan permohonan desain industry 15 dokumen B09: Penyelesaian tunggakan permohonan desain industry 15 dokumen	B07-B09:Laporan penyelesaian tunggakan permohonan Desain Industri B07, B08, dan B09	100
	B10-B12: B10: Penyelesaian tunggakan permohonan desain industry 15 dokumen B11: Penyelesaian tunggakan permohonan	B10-B12:Laporan penyelesaian tunggakan permohonan Desain Industri B10, B11, dan B12	100

		desain industry 15 dokumen B12: Penyelesaian tunggakan permohonan desain industry 15 dokumen		
6	Pemetaan Potensi Ekonomi KIK di 7 wilayah	B01-B03: B01:Penyusunan Tim Pelaksanaan Pemetaan Potensi Ekonomi KIK di wilayah B02: Perencanaan kegiatan pemetaan potensi ekonomi KIK di wilayah B03: Persiapan kegiatan pemetaan potensi ekonomi KIK di wilayah	B01: SK Tim Pelaksanaan Pemetaan Potensi Ekonomi KIK di wilayah B02: Laporan Perencanaan kegiatan pemetaan potensi ekonomi KIK di wilayah B03:Laporan perencanaan dan persiapan kegiatan pemetaan potensi ekonomi KIK di wilayah	100
		B04-B06: Pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di pulau Sumatera/Jawa/Bali	Laporan Pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di pulau Sumatera/Jawa/Bali	100
		B07-B09 : Pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di Sulawesi/Kalimantan/ Papua/ Maluku	Laporan Pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di Sulawesi/Kalimantan/ Papua/ Maluku	100
		B10-B12: B10: Monitoring dan Evaluasi daftar KI komunal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi di tahun selanjutnya; B11: Inventarisasi Pelaksanaan Kegiatan KI komunal Tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi di tahun	B10: Laporan Monev daftar KI komunal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi di tahun selanjutnya; B11: Laporan Inventarisasi Pelaksanaan Kegiatan KI komunal Tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan sebagai	100

		selanjutnya; B12:-	sumber ekonomi di tahun selanjutnya; B12:-	
7	Penyempurnaan Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual dalam peningkatan kualitas layanan KI (Merek, Paten, Desain Industri)	B01-B03 B01:Penyusunan dan Penerbitan SK Tim Pokja Aplikasi Sistem Administrasi KI B02:Rapat Koordinasi dengan Unit Teknis/stakeholder B03:Rapat koordinasi Subdit Pengembangan Sistem Administrasi KI	B01: SK Tim Pokja Aplikasi Sistem Administrasi KI B02: Dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dengan Unit Teknis/stakeholder B03: Dokumen laporan hasil Rapat koordinasi Subdit Pengembangan Sistem Administrasi KI	100
B04-B06: Koordinasi/Pendampingan kepada unit teknis/stakeholder dan Uji Testing Penyelesaian Masalah Subdit Pengembangan SIKI		Laporan hasil Koordinasi/Pendampingan kepada unit teknis/stakeholder dan laporan hasil Uji Testing Penyelesaian Masalah Subdit Pengembangan SIKI	100	
B07-B09 : Koordinasi/Pendampingan kepada unit teknis/stakeholder dan Uji Testing Penyelesaian Masalah Subdit Pengembangan SIKI		Laporan hasil Koordinasi/Pendampingan kepada unit teknis/stakeholder dan laporan hasil Uji Testing Penyelesaian Masalah Subdit Pengembangan SIKI	100	
B10-B12: B10: Koordinasi/Pendampingan kepada unit teknis/stakeholder dan Uji Testing B11: Sosialisasi Aplikasi B12: Penyampaian Laporan		B10: Laporan Koordinasi/Pendampingan kepada unit teknis/stakeholder dan Uji Testing B11: Laporan hasil sosialisasi aplikasi	100	

		Penyempurnaan Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual	B12: Dokumen Laporan Penyempurnaan Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual	
8	Penyempurnaan Sistem e-HakCipta dalam peningkatan kualitas layanan KI	<p>B01-B03 B01: Penyusunan dan penerbitan SK Tim Pokja Aplikasi e-hakcipta serta Rapat Koordinasi dengan unit teknis/stakeholder dan Subdit Pengembangan SIKI</p> <p>B02-B03: Koordinasi/pendampingan kepada unit teknis/stakeholder dan Uji Testing penyelesaian masalah subdit Pengembangan SIKI</p>	<p>B01: SK Tim Pokja Aplikasi e-hakcipta serta Laporan hasil rapat koordinasi dengan unit teknis/stakeholder dan Subdit Pengembangan SIKI</p> <p>B02-B03:Laporan hasil Koordinasi/pendampingan kepada unit teknis/stakeholder dan Uji Testing penyelesaian masalah subdit Pengembangan SIKI</p>	100
		<p>B04-B06: Koordinasi/pendampingan kepada unit teknis/stakeholder dan Uji Testing penyelesaian masalah subdit Pengembangan SIKI</p>	<p>Laporan hasil Koordinasi/pendampingan kepada unit teknis/stakeholder dan Uji Testing penyelesaian masalah subdit Pengembangan SIKI</p>	100
		<p>B07-B09: Koordinasi/pendampingan kepada unit teknis/stakeholder dan Uji Testing penyelesaian masalah subdit Pengembangan SIKI</p>	<p>Laporan hasil Koordinasi/pendampingan kepada unit teknis/stakeholder dan Uji Testing penyelesaian masalah subdit Pengembangan SIKI</p>	100
		<p>B10-B12: B10: Koordinasi/pendampingan kepada unit</p>	<p>B10: Laporan hasil Koordinasi/pendampingan kepada unit</p>	100

		teknis/stakeholder dan Uji Testing penyelesaian masalah subdit Pengembangan SIKI B11: Sosialisasi aplikasi B12: Penyampaian Laporan Penyempurnaan Sistem e-HakCipta	teknis/stakeholder dan Uji Testing penyelesaian masalah subdit Pengembangan SIKI B11: Laporan hasil sosialisasi aplikasi B12: Dokumen Laporan Penyempurnaan Sistem e-HakCipta	
9	Mobile IP Clinic	B01-B03 B01: Pembentukan Tim Mobile IP Clinic dan Penyusunan Juklak Juknis Pelaksanaan MIC	B01: SK Tim MIC dan dokumen Juklak Juknis Pelaksanaan MIC	100
		B04-B06: Pelaksanaan MIC pada 5 kanwil sesi 1	Laporan Pelaksanaan MIC pada 5 kanwil sesi 1	100
		B07-B09 B07-B08: Pelaksanaan MIC pada 5 kanwil sesi 2 B09: Pelaksanaan MIC pada 4 kanwil sesi 2	B07-B08:Laporan Pelaksanaan MIC pada 5 kanwil sesi 2 B09:Laporan Pelaksanaan MIC pada 4 kanwil sesi 2	100
		B10-B12 B10: Pelaksanaan MIC pada 4 kanwil sesi 3 B11: Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan MIC B12: Inventarisasi pelaksanaan kegiatan MIC yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022	B10: Laporan Pelaksanaan MIC pada 4 kanwil sesi 3 B11: Laporan Monev pelaksanaan MIC B12: Laporan Inventarisasi pelaksanaan kegiatan MIC yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022	100
10	Sertifikasi ISO 37001 2016 atas layanan kekayaan	B01-B03 B01: Rapat perencanaan persiapan Penyusunan SK	B01: Laporan hasil rapat perencanaan persiapan	

	intelektual sebagai bentuk komitmen anti korupsi	Tim ISO 37001:2016 B02: Rapat persiapan Penyusunan SK Tim ISO 37001:2016 B03: Rapat persiapan penyusunan Program Kerja	Penyusunan SK Tim ISO 37001:2016 B02: SK Tim ISO 37001:2016 B03: Laporan Rapat persiapan penyusunan Program Kerja	100
		B04-B06 B04-B05: Sosialisasi Sertifikasi ISO 37001 2016 B06: Persiapan penyusunan dokumen, persyaratan dan persiapan ISO 37001 2016	B04-B05: Laporan hasil Sosialisasi Sertifikasi ISO 37001 2016 B06: Laporan Persiapan penyusunan dokumen, persyaratan dan persiapan ISO 37001 2016	100
		B07-B09 B07-B08: Pelatihan penyusunan dokumen, persyaratan dan persiapan ISO 37001 2016 B09: Penyusunan dokumen dan persyaratan ISO 37001 2016	B07-B08: Laporan hasil kegiatan Pelatihan penyusunan dokumen, persyaratan dan persiapan ISO 37001 2016 B09: Laporan Penyusunan dokumen dan persyaratan ISO 37001 2016	100
		B10-B12 B10: Penyusunan dokumen dan persyaratan ISO 37001 2016	B10: Laporan Penyusunan dokumen dan persyaratan ISO 37001 2016	100
		B11-B12: Pelaksanaan pemenuhan dokumentasi persiapan audit ISO 37001 2016	B11-B12: Penyampaian dokumentasi persiapan audit ISO 37001 2016	
		11	Penyelesaian Permohonan KI	B01-B03 B01: Pelaksanaan penyelesaian permohonan KI (Paten 2963 dokumen,

	<p>Desain Industri 338 dokumen) B02: Pelaksanaan penyelesaian permohonan KI (Paten 2963 dokumen, Desain Industri 338 dokumen) B03: Pelaksanaan penyelesaian permohonan KI (Paten 2963 dokumen, Desain Industri 338 dokumen)</p>	<p>338 dokumen) B02: Laporan penyelesaian permohonan KI (Paten 2963 dokumen, Desain Industri 338 dokumen) B03: Laporan penyelesaian permohonan KI (Paten 2963 dokumen, Desain Industri 338 dokumen)</p>	
	<p>B04-B06 B04: penyelesaian permohonan KI Paten 2963 dokumen Merek 8300 dokumen Desain Industri 338 dokumen B05: penyelesaian permohonan KI Paten 2963 dokumen Merek 8300 dokumen Desain Industri 338 dokumen B06: penyelesaian permohonan KI Paten 2963 dokumen Merek 8300 dokumen Desain Industri 338 dokumen</p>	<p>B04: Laporan penyelesaian permohonan KI Paten 2963 dokumen Merek 8300 dokumen Desain Industri 338 dokumen B05: Laporan penyelesaian permohonan KI Paten 2963 dokumen Merek 8300 dokumen Desain Industri 338 dokumen B06: Laporan penyelesaian permohonan KI Paten 2963 dokumen Merek 8300 dokumen Desain Industri 338 dokumen</p>	100
	<p>B07-B09 B07: penyelesaian permohonan KI Paten 2963 dokumen Merek 10000 dokumen Desain Industri 338 dokumen B08: penyelesaian permohonan KI Paten 2963 dokumen</p>	<p>B07: Laporan penyelesaian permohonan KI Paten 2963 dokumen Merek 10000 dokumen Desain Industri 338 dokumen B08: Laporan penyelesaian permohonan KI Paten 2963 dokumen</p>	100

		<p>Merek 10000 dokumen Desain Industri 338 dokumen B09: penyelesaian permohonan KI Paten 2963 dokumen Merek 10000 dokumen Desain Industri 338 dokumen</p>	<p>Merek 10000 dokumen Desain Industri 338 dokumen B09: Laporan penyelesaian permohonan KI Paten 2963 dokumen Merek 10000 dokumen Desain Industri 338 dokumen</p>	
		<p>B10-B12 B10: penyelesaian permohonan KI Paten 2963 dokumen Merek 10000 dokumen Desain Industri 338 dokumen B11: penyelesaian permohonan KI Paten 2963 dokumen Merek 10000 dokumen Desain Industri 338 dokumen B12: penyelesaian permohonan KI Paten 2963 dokumen Merek 10000 dokumen Desain Industri 338 dokumen</p>	<p>B10: Laporan penyelesaian permohonan KI Paten 2963 dokumen Merek 10000 dokumen Desain Industri 338 dokumen B11: Laporan penyelesaian permohonan KI Paten 2963 dokumen Merek 10000 dokumen Desain Industri 338 dokumen B12: Laporan penyelesaian permohonan KI Paten 2963 dokumen Merek 10000 dokumen Desain Industri 338 dokumen</p>	
12	Implementasi Kemenkumham Corporate University dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Ditjen KI di	<p>B01-B03 B01-B02: - B03: Inventarisasi kebutuhan/ketersediaan pelatihan kompetensi terkait dengan kompetensi administrative pemerintahan dan substansi KI</p>	<p>B03: Laporan Inventarisasi kebutuhan/ketersediaan pelatihan kompetensi terkait dengan kompetensi administrative pemerintahan dan substansi KI</p>	100

Unit Pusat dan Wilayah			
	B04-B06 B04: Analisa kebutuhan ASN Ditjen KI di Unit Pusat dan Wilayah untuk memperoleh pendidikan pelatihan terkait dengan kompetensi administratif pemerintahan dan substansi KI B05:- B06: Pelaksanaan diklat/pelatihan	B04: laporan hasil Analisa kebutuhan pendidikan/pelatihan yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi SDM B05:- B06: Laporan Pelaksanaan diklat/pelatihan	100
	B07-B09 B07-B08:- B09: Pelaksanaan diklat/pelatihan	B09: Laporan Pelaksanaan diklat/pelatihan	100
	B10-B12 B10-B11: - B12: Monev hasil pelaksanaan diklat	B12: Laporan monev pelaksanaan diklat/pelatihan	100

Screenshot Penilaian Target Kinerja Program KI yang diampu DJKI Tahun 2022

T22-801	Peluncuran POP-HC untuk mendorong karya cipta	100	Keterangan User : data dukung pada lampiran 1 Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • HKI.2.PR.04.01-15 Penyampaian Data Dukung Target Kinerja B01 Tahun 2022 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.pdf <p>Tutup</p>	Terpenuhi
T22-802	Penyusunan SK/ TM pelaksanaan Tahun Hak Cipta Rapat penyusunan konsep kegiatan tahun hak cipta dan penetapan Lokasi	100	Keterangan User : Data dukung pada lampiran 1 Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • HKI.2.PR.04.01-16 Penyampaian Data Dukung Target Kinerja B02 Tahun 2022 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.pdf <p>Tutup</p>	Terpenuhi
T22-803	Peaksanaan Tahun Hak Cipta pada lokus roving DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan	100	Keterangan User : Data dukung pada lampiran 1 Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • HKI.2.PR.04.01-17 Penyampaian Data Dukung Target Kinerja B03 Tahun 2022 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.pdf <p>Tutup</p>	Terpenuhi
T22-804	Webinar Tahun Hak Cipta	100	Keterangan User : lampiran 1 Keterangan Verifikator : Data Dukung Lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • HKI.2.PR.04.01-28 B04 - Penyampaian Data Dukung Target Kinerja.pdf <p>Tutup</p>	Terpenuhi
T22-805	Webinar Tahun Hak Cipta	100	Keterangan User : lampiran 1 Keterangan Verifikator : Data Dukung Lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • HKI.2.PR.04.01-27 B05 - Penyampaian Data Dukung Target Kinerja.pdf <p>Tutup</p>	Terpenuhi
T22-806	Peaksanaan Tahun Hak Cipta pada lokus roving pada wilayah ke 3 Webinar Tahun Hak Cipta	100	Keterangan User : Lampiran 1 Keterangan Verifikator : Data Dukung Lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • HKI.2.PR.04.01-28 B06 - Penyampaian Data Dukung Target Kinerja.pdf <p>Tutup</p>	Terpenuhi
T22-807	Peaksanaan Tahun Hak Cipta pada lokus roving pada wilayah ke 4	100	Keterangan User : kegiatan sosialisasi Hak Cipta dengan Tema "Peluang Karya Cipta Film yang Diadaptasi dari Novel" Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • B07 - Penyampaian Data Dukung Target Kinerja.pdf <p>Tutup</p>	Terpenuhi
T22-808	Peaksanaan Tahun Hak Cipta pada lokus roving pada wilayah ke 5	100	Keterangan User : Webinar Pelindungan Karya Seni Lukis "Ekspresikan Imajinasimu, Lindungi Karyamu" Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • B08 - Penyampaian Data Dukung Target Kinerja.pdf <p>Tutup</p>	Terpenuhi
T22-809	Webinar Tahun Hak Cipta	100	Keterangan User : pelaksanaan sosialisasi HKI pada kamwil dan pelaksanaan RUKI Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • B09 - Penyampaian Data Dukung Target Kinerja.pdf <p>Tutup</p>	Terpenuhi
T22-810	Peaksanaan Tahun Hak Cipta pada lokus roving ke 6	100	Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • B10 - Penyampaian Data Dukung Target Kinerja (2).pdf <p>Tutup</p>	Terpenuhi
T22-812	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Hak Cipta tahun 2022	100	Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • B12.pdf 	Terpenuhi

Detail Capaian					
Periode	Target Pencapaian	Capaian	Keterangan	Data Pendukung	Status
T22-801	- Pembentukan Tim - Penyusunan Petunjuk pelaksanaan MIC	100	Keterangan User : SK Tim nya yang Pelaksanaan Program Unggulan. Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> SK Tim Pelaksanaan Program Unggulan DAKI.pdf 	Terselesaikan
T22-802	- Sosialisasi Panduan pelaksanaan MIC kepada karavel - Penguatan kelas MIC karavel kepada DUK	100	Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> Notis sosialisasi ke kantor wilayah.pdf Undangan Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Program Unggulan MIC tahun 2022.pdf 	Terselesaikan
T22-803	Penyusunan Jadwal Pelaksanaan MIC pada 33 Wilayah	100	Keterangan User : data dukung telah sesuai Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> HK-PR.01.03-34 Penyempurnaan Jadwal Pelaksanaan Mobile IP Clinic Tahun 2022 oleh Karavel Kementerianham.pdf 	Terselesaikan
T22-804	Pelaksanaan MIC pada 5 karavel sesuai 1	100	Keterangan User : Kegiatan MIC di karavel DUK jkarta Keterangan Verifikator : Data Dukung Lengkap	<ul style="list-style-type: none"> LAPORAN KEGIATAN MIC DUK JAWARTA.pdf 	Terselesaikan
T22-805	Pelaksanaan MIC pada 5 karavel sesuai 1	100	Keterangan Verifikator : Data Dukung Lengkap	<ul style="list-style-type: none"> Laporan MIC Sumatera Utara.pdf Laporan MIC Gorontalo.pdf dokumentasi gorontalab.zip Laporan .pdf Laporan Kegiatan MIC Bandung.pdf Dokumentasi bandung.pdf Laporan kegiatan MIC SULSEL.pdf Laporan MIC Kaltang .pdf LAPORAN MIC MAMUQU .pdf 	Terselesaikan

2) Prioritas Nasional “KI Komunal”

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pengampu salah satu Program Prioritas Nasional Tahun 2022 yaitu pada Program Nasional (PN) 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dengan Program PN: Pelindungan Kekayaan Budaya Komunal dan Hak Cipta serta Sasaran Program PN: Terwujudnya pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta memiliki capaian sebagai berikut. Pada tahun 2022 Prioritas Nasional KI Komunal yang ditargetkan adalah terbentuknya 1 Peta Potensi Ekonomi KIK. Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pendampingan dalam rangka penyusunan peta potensi KI Komunal di 7 wilayah Pulau utama di Indonesia (Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua, Maluku) dengan serapan anggaran sebesar Rp 776.285.039,00 dari pagu Rp 1.000.000.000,00;
2. Telah terinventarisir KIK sebanyak 1071 yang diajukan ke DJKI dan dari jumlah tersebut terdapat 633 KIK yang sudah tervalidasi;

3. Melaksanakan rapat koordinasi dengan anggota tim lintas sektoral guna menghasilkan data potensi ekonomi KIK yang komprehensif;serta
4. Menyusun **Peta Potensi Ekonomi KIK** dimana terdapat sekitar 398 potensi KIK yang bernilai ekonomi di hampir 15 provinsi guna diberdayakan sehingga potensi ekonomi KIK tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat lokal tempat asal KIK tersebut berada.



3) Program Unggulan DJKI 2022

Sepanjang tahun 2022 merupakan tahun yang masih penuh dengan tantangan terutama terkait dengan Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemic COVID-19. Dalam hal ini DJKI melakukan beberapa inisiatif guna mengakselerasi percepatan pelaksanaan program dan kegiatan untuk menyokong kinerja DJKI lebih baik dan optimal. Salah satunya adalah melalui Program Unggulan DJKI 2022. Adapun berikut ke-16 Program Unggulan DJKI Tahun 2022:

1. Roving Seminar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak “Berkeadilan”;
3. Persetujuan Otomatis Pelayanan Hak (Hak Cipta) Kekayaan Intelektual (POP-HC);

4. *Mobile Intellectual Property Clinic*;
5. *Intellectual Property Marketplace*;
6. *Drafting Patent Camp*;
7. Penyusunan Peta Potensi Ekonomi Kekayaan Intelektual Komunal;
8. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Aktif Mendengar untuk Memberi Solusi;
9. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Aktif Belajar dan Mengajar;
10. Sertifikasi Pusat perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual;
11. Sertifikasi ISO 9001:2015 (Sertifikasi Manajemen Mutu);
12. Sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan);
13. Sertifikasi Ahli Penyuluh Anti Korupsi;
14. Audit dan Peningkatan Sistem Teknologi Informasi;
15. Sinergi dan Kolaborasi Antar Unit dengan Unit Layanan Pengadaan;
16. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa.





IMPLEMENTASI PROGRAM UNGGULAN DJKI

DRAFTING



- Total peserta :123
- Dokumen yang dihasilkan : 234



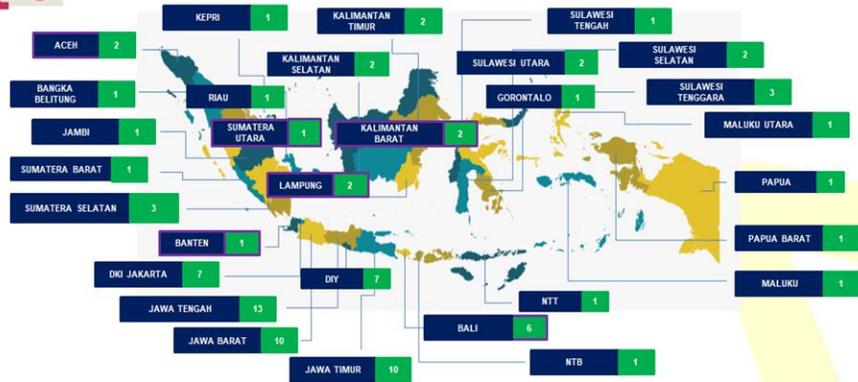
SERTIFIKAT ISO



DJKI, meraih sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan hasil Nihil Temuan



PELAKSANAAN SERTIFIKASI PUSAT BELANJA BERBASIS KI



Total yang sudah disertifikasi : 29 Provinsi (87 pusat perbelanjaan)

**INOVASI REVOLUSIONER LAYANAN PUBLIK KINERJA
DJKI TAHUN 2022**

POP HC
Kini Pencatatan Hak Cipta Semakin Cepat!
KURANG DARI 10 MENIT
Untuk Pencatatan Hak Cipta Anda Kurang!
hakcipta.djip.go.id
PERSETUJUAN OTOMATIS PENCATATAN HAK CIPTA

POP MEREK
PERSETUJUAN OTOMATIS PERPANJANGAN MEREK
DURASI 310 HARI
Perpanjang Tanpa Biaya Mendaftar
Perpanjang Tanpa Biaya Mendaftar
PERSETUJUAN OTOMATIS PERPANJANGAN MEREK

- Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek
- Persetujuan Otomatis Permohonan Petikan Merek
- Persetujuan Otomatis Pencatatan Lisensi Merek

IP. MARKET PLACE
IP. MARKET PLACE
MENDORONG KOMERSIALISASI TERHADAP PRODUK KI TERDAFTAR.

Terkait capaian dari beberapa program unggulan DJKI dapat disampaikan bahwa pelaksanaan beberapa Program Unggulan DJKI 2022 khususnya yang terkait dengan peningkatan pemahaman dan diseminasi informasi KI guna mendorong peningkatan permohonan KI nasional serta peningkatan kesadaran akan urgensi perlindungan KI maka telah terlaksana dengan baik kegiatan:

1. Roving Seminar Kekayaan Intelektual yang telah berhasil menjangkau audiens sebanyak 5.005 peserta dan Yasonna Mendengar sebanyak 2.664 peserta dari pelaksanaan di 5 Kota;
2. *Mobile IP Clinic* (salah satu program unggulan yang mendapat antusiasme dari masyarakat dan apresiasi dari DPR dimana lembaga legislative mengakui program seperti *Mobile IP Clinic* sebagai upaya DJKI dalam menjemput bola potensi-potensi KI di seluruh wilayah Indonesia) telah berhasil mencatatkan peserta yang diseminasi informasi sebanyak 9.747 di 33 Provinsi;
3. DJKI Mengajar yang dilaksanakan secara serentak di 33 Provinsi dan berhasil mengangkat 346 RuKI (Guru KI) terpilih dari lingkungan Kemenkumham yang secara

serentak mengajar siswa SD,SMP pada 175 sekolah terpilih di 33 Provinsi dengan total peserta sebanyak 5.000 orang siswa;

4. OPERA (Organisasi Pembelajaran) DJKI sebagai media belajar dalam rangka mewujudkan DJKI sebagai bagian dari Kemenkumham Corporate University dimana dalam pelaksanaan OPERA yang dilakukan secara daring selama tahun 2022 telah mencatatkan sebanyak 3.563 peserta dari internal DJKI dan kegiatan IP Talks yang telah berhasil menarik 5.933 audiens baik dari internal maupun eksternal DJKI (masyarakat) yang juga pelaksanaannya dilakukan secara daring;
5. Peningkatan pemahaman dalam tingkat lanjut terkait Paten melalui Patent Drafting Camp yang telah diikuti oleh 123 peserta (sebagian besar berasal dari civitas perguruan tinggi) serta 123 peserta (sebagian besar berasal dari civitas perguruan tinggi) serta berhasil mencatatkan output sebanyak 234 dokumen permohonan paten yang potensial untuk didaftarkan pelindungannya; serta
6. Telah dilakukan sertifikasi terhadap 77 Pusat Perbelanjaan Berbasis KI di 33 Provinsi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensi perlindungan KI terutama pada produk-produk yang telah terdaftar KI nya dan mencegah tindakan pelanggaran HKI atas produk KI yang telah terdaftar tersebut.

Kesemua program unggulan yang dilakukan tersebut merupakan kerja sama DJKI dengan Kanwil Kemenkumham di 33 Provinsi serta berbagai stakeholder KI terkait lainnya dimana hal ini sebagai langkah kolaborasi aktif dalam mewujudkan Ekosistem KI nasional.

Lalu terkait dengan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi pada layanan KI juga selama tahun 2022 DJKI berinovasi dengan langkah yang cukup revolusioner yaitu melalui peluncuran *IP Market Place* sebagai wadah untuk mendorong pemberdayaan dalam meningkatkan nilai tambah serta komersialisasi terhadap produk KI yang telah terdaftar. Lalu terkait perlindungan KI Komunal juga DJKI telah berupaya mengintegrasikan data yang ada pada aplikasi Pusat Data Nasional KIK dengan data yang dimiliki Kementerian/Lembaga terkait, dimana hingga saat ini telah terdapat sebanyak 633 data KIK yang telah tervalidasi dan tercatatkan di dalam aplikasi Pusat Data Nasional KIK.



INOVASI REVOLUSIONER LAYANAN PUBLIK KINERJA DJKI TAHUN 2022

PDKI



**Pusat Data Nasional KIK
Terintegrasi dengan K/L**

**FULLTEXT
PUBLIKASI A
dan PUBLIKASI
B PATEN**



PDLM

Pusat Data Lagu dan/Musik

Selain itu DJKI juga pada tahun 2022 melakukan beberapa langkah inovasi Menjelang penghujung tahun 2022 DJKI juga terus berinovasi dalam rangka meningkatkan layanan publik yang berbasis pada transformasi digital khususnya dalam rangka menyambut tahun 2023 sebagai Tahun Tematik bagi Merek, yaitu melalui peluncuran POP (Persetujuan Otomatis Pengajuan) Pencatatan Lisensi Merek dan Aplikasi POP Petikan Resmi Merek. Dalam kesempatan yang sama diluncurkan beberapa aplikasi lainnya yaitu Aplikasi PDKI Full-text Publikasi A dan B dan Aplikasi Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM).

4) Penghargaan dan Prestasi DJKI Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022 DJKI menorehkan berbagai capaian dan prestasi sebagai berikut. Terkait dengan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja DJKI, maka pada tahun 2022 DJKI menjadi unit Eselon I tertinggi yang meraih raihan skor untuk implementasi Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan SAKIP. Raihan skor 99,01 untuk implementasi Reformasi Birokrasi serta nilai 84,35 untuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya DJKI juga menutup akhir tahun dengan meraih beberapa penghargaan yaitu:

1. DJKI meraih Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyusapan ISO 37001:2016 dari TÜV Nord (lembaga sertifikasi internasional) dengan hasil NIHIL Temuan yang diterima DJKI pada November lalu;



2. DJKI meraih beberapa kategori penghargaan dari *Public Relation Indonesia Award* yaitu: *Silver Winner* untuk Video Profil DJKI yang berasal dari Lembaga Pemerintah serta *Bronze Winner* untuk kategori *e-Magazine Media HKI*;



3. DJKI meraih Predikat Luar Biasa dari TOP DIGITAL AWARDS (penghargaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terbesar di tanah air terhadap korporasi/instansi pemerintah/sosok yang melakukan implementasi TI dan komunikasi terbaik di

bidangnya) Dalam penghargaan ini DJKI meraih TOP LEVEL 5 dalam *Top Digital Implementation Awards* serta Plt.Dirjen KI sebagai *Top Leader Digital Implementation #LevelStar5*. Raihan ini tidak lain berkat upaya DJKI memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan perlindungan KI melalui aplikasi online pada 2022.

Diharapkan di tahun-tahun mendatang segenap program, kegiatan, dan kinerja serta raihan penghargaan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022 (LKjIP DJKI 2022) disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, serta pelaksanaan Renstra DJKI 2020- 2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Dimana Penetapan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahap awal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menuju terwujudnya untuk capaian DJKI. Dalam proses penetapannya, senantiasa terus dilakukan penyempurnaan indikator kinerja yang merefleksikan prioritas DJKI dan kondisi terkini dengan target yang menantang. Dengan harapan, sistem manajemen ini tidak hanya menjadi rutinitas, namun harus mampu menggambarkan dan mendorong reformasi organisasi. Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi seluruh jajaran DJKI dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2022.

Secara ideal kualitas perencanaan yang baik adalah ketika capaian yang dihasilkan atau terealisasi sesuai atau mendekati dengan jumlah yang telah ditargetkan. Jika realisasi atau capaian jauh melebihi dari yang jumlah yang ditargetkan hingga mencapai anomali, dapat dikatakan perencanaan tersebut kurang efektif. Begitu pula jika jumlah realisasi jauh tidak mencapai dari yang ditargetkan pun perencanaan dapat dikatakan proses perencanaan belumlah efektif. Pada tahun 2022 masih terdapat output yang belum secara maksimal mencapai sesuai dengan yang ditargetkan, seperti penyelesaian permohonan Desain Industri atau penyelesaian permohonan Paten yang masih berada dibawah persentase target yang diharapkan. Tentunya hal ini terjadi disebabkan oleh beerbagai faktor, terutama mengingat jumlah permohonan KI yang semakin masif dan meningkat sedangkan ketersediaan SDM ASN yang existing masih belum

begitu proporsional. Memang terdapat juga beberapa capaian yang dalam pelaksanaannya mengalami kendala-kendala yang cukup strategis. Oleh karena itu haruslah kita carikan solusinya dan tidak menjadi halangan bagi insan DJKI untuk terus semangat memberikan kinerja dan dedikasi terbaik bagi DJKI. Kedepan kami akan semakin berkomitmen untuk berbenah di segala lini baik dari substansi pelaksanaan tugas DJKI yang terkait dengan unit teknis hingga dukungan manajemen dan optimalisasi teknologi informasi semakin ditingkatkan.

Sepanjang tahun 2022 merupakan tahun yang masih penuh dengan tantangan terutama terkait dengan Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemic COVID-19. Dalam hal ini DJKI melakukan beberapa inisiatif guna mengakselerasi percepatan pelaksanaan program dan kegiatan untuk menyokong kinerja DJKI lebih baik dan optimal. Salah satunya adalah melalui Program Unggulan DJKI 2022. Adapun berikut ke-16 Program Unggulan DJKI Tahun 2022:

1. Roving Seminar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak “Berkeadilan”;
3. Persetujuan Otomatis Pelayanan Hak (Hak Cipta) Kekayaan Intelektual (POP-HC);
4. *Mobile Intellectual Property Clinic*;
5. *Intellectual Property Marketplace*;
6. *Drafting Patent Camp*;
7. Penyusunan Peta Potensi Ekonomi Kekayaan Intelektual Komunal;
8. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Aktif Mendengar untuk Memberi Solusi;
9. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Aktif Belajar dan Mengajar;
10. Sertifikasi Pusat perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual;
11. Sertifikasi ISO 9001:2015 (Sertifikasi Manajemen Mutu);
12. Sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan);
13. Sertifikasi Ahli Penyuluh Anti Korupsi;
14. Audit dan Peningkatan Sistem Teknologi Informasi;
15. Sinergi dan Kolaborasi Antar Unit dengan Unit Layanan Pengadaan;
16. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa.

Terkait capaian dari beberapa program unggulan DJKI dapat disampaikan bahwa pelaksanaan beberapa Program Unggulan DJKI 2022 khususnya yang terkait dengan peningkatan pemahaman dan diseminasi informasi KI guna mendorong peningkatan permohonan

KI nasional serta peningkatan kesadaran akan urgensi perlindungan KI maka telah terlaksana dengan baik kegiatan:

1. Roving Seminar Kekayaan Intelektual yang telah berhasil menjangkau audiens sebanyak 5.005 peserta dan Yasonna Mendengar sebanyak 2.664 peserta dari pelaksanaan di 5 Kota;
2. *Mobile IP Clinic* (salah satu program unggulan yang mendapat antusiasme dari masyarakat dan apresiasi dari DPR dimana lembaga legislative mengakui program seperti *Mobile IP Clinic* sebagai upaya DJKI dalam menjemput bola potensi-potensi KI di seluruh wilayah Indonesia) telah berhasil mencatatkan peserta yang diseminasi informasi sebanyak 9.747 di 33 Provinsi;
3. DJKI Mengajar yang dilaksanakan secara serentak di 33 Provinsi dan berhasil mengangkat 346 RuKI (Guru KI) terpilih dari lingkungan Kemenkumham yang secara serentak mengajar siswa SD,SMP pada 175 sekolah terpilih di 33 Provinsi dengan total peserta sebanyak 5.000 orang siswa;
4. OPERA (Organisasi Pembelajaran) DJKI sebagai media belajar dalam rangka mewujudkan DJKI sebagai bagian dari Kemenkumham Corporate University dimana dalam pelaksanaan OPERA yang dilakukan secara daring selama tahun 2022 telah mencatatkan sebanyak 3.563 peserta dari internal DJKI dan kegiatan IP Talks yang telah berhasil menarik 5.933 audiens baik dari internal maupun eksternal DJKI (masyarakat) yang juga pelaksanaannya dilakukan secara daring;
5. Peningkatan pemahaman dalam tingkat lanjut terkait Paten melalui Patent Drafting Camp yang telah diikuti oleh 123 peserta (sebagian besar berasal dari civitas perguruan tinggi) serta 123 peserta (sebagian besar berasal dari civitas perguruan tinggi) serta berhasil mencatatkan output sebanyak 234 dokumen permohonan paten yang potensial untuk didaftarkan pelindungannya; serta
6. Telah dilakukan sertifikasi terhadap 77 Pusat Perbelanjaan Berbasis KI di 33 Provinsi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensi perlindungan KI terutama pada produk-produk yang telah terdaftar KI nya dan mencegah tindakn pelanggaran HKI atas produk KI yang telah terdaftar tersebut.

Kesemua program unggulan yang dilakukan tersebut merupakan kerja sama DJKI dengan Kanwil Kemenkumham di 33 Provinsi serta berbagai stakeholder KI terkait lainnya dimana hal ini sebagai langkah kolaborasi aktif dalam mewujudkan Ekosistem KI nasional.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan beberapa inovasi dalam peningkatan layanan public dalam bentuk otomatisasi pengajuan permohonan KI (seperti halnya pada POP Hak Cipta) yaitu yang terkait dengan permohonan Merek yaitu: melalui Persetujuan Otomatis Perpanjangan (POP) Merek yang diluncurkan di awal tahun 2022 telah mencatatkan sebanyak 3.174 permohonan perpanjangan yang diajukan dan berkontribusi terhadap Rp 8.158.300.000,00 bagi PNBPN DJKI.

Pada tahun 2022 DJKI menerima sebanyak 257.335 permohonan KI (baik KI Konvensional dan KI Komunal) jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 26,41% jika dibandingkan tahun 2021. Selanjutnya DJKI pada tahun 2022 berhasil menyelesaikan penyelesaian permohonan KI sebanyak 296.904 permohonan (mengalami peningkatan sebesar 15,09% jika dibandingkan tahun sebelumnya).

Selama tahun 2022 telah terlaksana penyerapan anggaran sebesar Rp 485.987.311.076,00 (atau sekitar 83,43%) dari alokasi DIPA anggaran Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual tahun anggaran 2022 yaitu sejumlah Rp 582.450.099.000,00. Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan persentase capaian penyerapan anggaran di tahun 2021 (81,79%).

Adapun realisasi penerimaan PNBPN atas layanan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh DJKI kepada masyarakat pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 805.681.673.387,00 atau sekitar 94,78% dari target PNBPN delapan ratus lima puluh miliar rupiah).

B. Saran

Kedepannya dalam rangka memajukan perlindungan Kekayaan Intelektual dan peningkatan permohonan KI, maka pada tahun 2023 akan terdapat beberapa Program Unggulan DJKI yang dibagi ke dalam 4 *cluster* besar utama dengan masing-masing *cluster* terdiri dari program kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan permohonan KI sebesar 17% di tahun 2023 melalui:
 - a. *One Village One Brand*;

- b. Safari Menkumham;
 - c. *Mobile IP Clinic*;
 - d. DJKI aktif belajar mengajar.
2. Meningkatkan jumlah KI nasional yang dilindungi sebesar 8% melalui:
- a. *Drafting Patent Camp*;
 - b. *Geographical Indication Drafting Camp*;
 - c. *Indonesia IP Academy*;
 - d. Persiapan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024;
 - e. Prioritas Nasional KI Komunal.
3. Menyelesaikan permohonan KI sebesar 99% melalui:
- a. POP (Pendaftaran Online Permohonan) Merek;
 - b. Penerapan ISO 9001:2015 di lingkungan DJKI;
 - c. Sertifikasi ISO 27001 Keamanan Sistem Teknologi Informasi.
4. Menyelesaikan penanganan aduan pelanggaran KI sebesar 100% melalui Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI.

Kita berharap agar seluruh elemen dan komponen baik dari Unit teknis (Direktorat Merek dan Indikasi Geografis; Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang, dan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri) serta unit yang terkait *core business* DJKI (Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI) dapat saling bahu-membahu dengan unit fasilitator seperti Sekretariat dan Direktorat Teknologi Informasi KI guna menyukseskan pencapaian program dan kinerja DJKI di tahun mendatang.

Kedepan kami akan semakin berkomitmen untuk berbenah di segala lini baik dari substansi pelaksanaan tugas DJKI yang terkait dengan unit teknis hingga dukungan manajemen dan optimalisasi teknologi informasi semakin ditingkatkan mengingat visi DJKI sebagai salah satu *World Class IP Office* menjadi pemicu kami untuk semakin berbenah dan memperbaiki diri.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Razilu

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Yasonna H. Laoly

Razilu
NIP. 196511281991031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2 Indeks

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	1. Persentase Penyelesaian Pencatatan Hak Cipta	100%
		2. Persentase Penyelesaian Permohonan Desain Industri	100%
		3. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Hak Cipta dan Desain Industri	100%
2.	Mewujudkan Potensi Kekayaan Intelektual Mempunyai Nilai Ekonomis	1. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual	15%
		2. Persentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Perlindungan KI	60%
3.	Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di Seluruh Indonesia	1. Persentase Merek dan Indikasi Geografis yang Dilindungi	15%
		2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis	100%
4.		1. Persentase Paten, DTLST, dan RD yang Dilindungi	15%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terlindungnya Paten, DTLST, dan RD di Seluruh Indonesia	2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD	100%
5.	Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Persentase Penyelesaian Sengketa HKI secara Optimal	70%
6.	Terwujudnya Sistem Manajemen Data Informasi dan Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT yang Sistematis, Efektif,, Handal dan Berkelanjutan	1. Persentase Peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal	99,50%
7.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	4839 Layanan
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	33 Lokus
8.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	66 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	56 Laporan
9.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajerial dan Teknis Ditjen Kekayaan Intelektual	1. Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual	82 Nilai
		2. SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual	3,32 Indeks
		3. Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"	80,5 Nilai
		4. Nilai Perencanaan Anggaran DJKI Berorientasi pada Hasil SMART DJA	93 %
		5. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	80 Nilai

No.	Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum		Rp. 196.004.383.000,-
1.	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 5.780.692.000,-
2.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Rp. 24.054.939.000,-
3.	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 7.128.735.000,-
4.	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 8.228.956.000,-
5.	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp. 4.567.599.000,-
6.	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp. 111.237.585.000,-
7.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 35.005.877.000,-
Program Dukungan Manajemen		Rp. 389.391.628.000,-
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp. 389.391.628.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP. 196511281991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anom Wibowo
Jabatan : Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : PIt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,
PIt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian
Sengketa

Anom Wibowo
NRP. 72060453

Open with ▾

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Persentase Penyelesaian Sengketa HKI secara Optimal	70%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 4.567.599.000,-
1.	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp. 4.567.599.000,-

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa



Anom Wicakso
NRP. 72060453

Open with ▾



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anom Wibowo

Jabatan : Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2022

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian
Sengketa

Anom Wibowo
NRP. 72060453



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nofli
Jabatan : Direktur Merek dan Indikasi Geografis

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : PIt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,
PIt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Direktur Merek dan Indikasi Geografis

Nofli
NIP. 196903091992031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia	1. Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi	15%
		2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 7.128.735.000,-
1.	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 7.128.735.000,-

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,
Pjt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Merek dan Indikasi Geografis

1
2



Razilu
NIP. 196511281991031002



Nofli
NIP. 196903091992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nofli
Jabatan : Direktur Merek dan Indikasi Geografis

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2022
Direktur Merek dan Indikasi Geografis

Nofli
NIP. 196903091992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sucipto
Jabatan : Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Direktur Teknologi Informasi
Kekayaan Intelektual

Sucipto
NIP. 197103251999031001

Open with ▾

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Manajemen Data Informasi dan Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT yang Sistematis, Efektif, Handal dan Berkelanjutan	Peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal	99,50%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 111.237.585.000,-
1.	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp. 111.237.585.000,-

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,
Pit. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Teknologi Informasi
Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Sucipto
NIP. 197103251999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sucipto

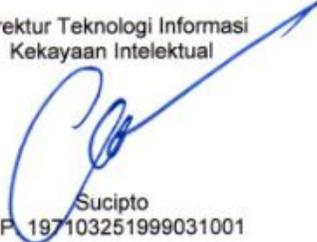
Jabatan : Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2022

Direktur Teknologi Informasi
Kekayaan Intelektual



Sucipto
NIP. 197103251999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Daulat Pandapotan Silitonga
Jabatan : Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan
Kekayaan Intelektual

Daulat Pandapotan Silitonga
NIP. 196205281989031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis	1. Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual	15%
		2. Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI	60%

No.	Kegiatan	Anggaran
013.BF	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 24.054.939.000,-
1.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Rp. 24.054.939.000,-

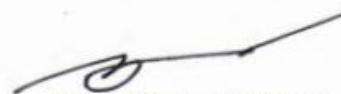
Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,
Pit. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan
Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP. 196511281981031002



Daulat Pandapotan Silitonga
NIP. 196205281989031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Daulat Pandapotan Silitonga
Jabatan : Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2022

Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan
Kekayaan Intelektual


Daulat Pandapotan Silitonga
NIP. 196205281989031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN
RAHASIA DAGANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dede Mia Yusanti
Jabatan : Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu dan Rahasia Dagang

Dede Mia Yusanti
NIP. 196407051992032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA
DAGANG DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia	1. Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi	15%
		2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 8.228.956.000,-
1.	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 8.228.956.000,-

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,
 Pjt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
 NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
 Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang



Dede Mia Yusanti
 NIP. 196407051992032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN
RAHASIA DAGANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama Dede Mia Yusanti

Jabatan Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2022

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu dan Rahasia Dagang



Dede Mia Yusanti
NIP. 196407051992032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
Jabatan : Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP. 197112182002121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32

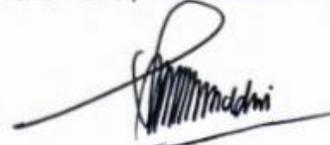
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	1. Persentase Penyelesaian Pencatatan Hak Cipta	100%
		2. Persentase Penyelesaian Permohonan Desain Industri	100%
		3. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Hak Cipta dan Desain Industri	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 5.780.692.000,-
1.	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 5.780.692.000,-

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,
Pit. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Razilu
NIP. 196511281991031032

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP. 197112182002121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAI SENGKETA
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
Jabatan : Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2021

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP. 197112182002121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sucipto
Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual

Sucipto
NIP. 197103251999031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	85,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	93%
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajerial dan Teknis Ditjen Kekayaan Intelektual	Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual	82 Nilai
		SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual	3,32 Indeks
		Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"	80,5 Nilai
		Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA	93 %
		Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	80 Nilai

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 389.391.628.000,-
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp. 389.391.628.000,-

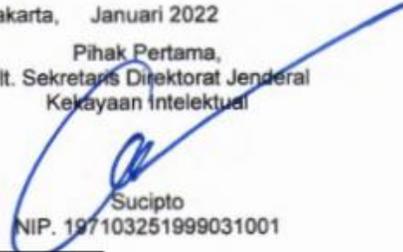
Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP. 196511281991031002

Jakarta, Januari 2022

Pihak Pertama,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual



Sucipto
NIP. 197103251999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sucipto

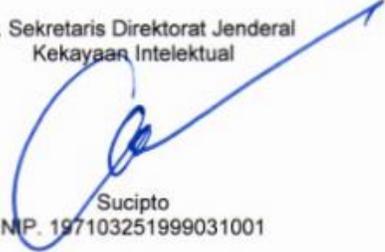
Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2022

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual


Sucipto
NP. 197103251999031001

DRAFT PERJANJIAN KINERJA DJKI TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2022

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Yasonna H. Laoly

Razilu
NIP. 196511281991031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	1. Persentase Penyelesaian Pencatatan Hak Cipta	100%
		2. Persentase Penyelesaian Permohonan Desain Industri	100%
		3. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Hak Cipta dan Desain Industri	100%
2.	Mewujudkan Potensi Kekayaan Intelektual Mempunyai Nilai Ekonomis	1. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual	17%
		2. Persentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Perlindungan KI	70%
		3. Persentase Pengembangan Pusat data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal	85%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di Seluruh Indonesia	1. Persentase Merek dan Indikasi Geografis yang Dilindungi	17%
		2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis	100%
4.	Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di Seluruh Indonesia	1. Persentase Paten, DTLST, dan RD yang Dilindungi	17%
		2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD	100%
5.	Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Persentase Penyelesaian Sengketa HKI secara Optimal	80%
6.	Terwujudnya Sistem Manajemen Data Informasi dan Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT yang Sistematis, Efektif, Handal dan Berkelanjutan	1. Persentase ketersediaan layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang aman dan handal mencapai Service Level Agreement (SLA)	99,80%
7.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	5081 Layanan
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	33 Lokus
8.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	66 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	99 Laporan
9.	Meningkatnya Kualitas	1. Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual	83 Nilai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dukungan Manajerial dan Teknis Ditjen Kekayaan Intelektual	2. SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual	3,34 Indeks
		3. Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"	81 (Nilai)
		4. Nilai Perencanaan Anggaran DJKI Berorientasi pada Hasil SMART DJA	94%
		5. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	82 (Nilai)

No.	Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum		Rp. 211.069.780.000,-
1.	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 4.541.686.000,-
2.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Rp. 22.000.000.000,-
3.	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 6.445.914.000,-
4.	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 9.079.825.000,-
5.	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp. 4.005.607.000,-
6.	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp. 113.102.537.000,-
7.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 51.894.211.000,-
Program Dukungan Manajemen		Rp. 402.797.069.000,-
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp. 402.797.069.000,-

Jakarta, November 2022

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Yasonna H. Laoly

Razilu
NIP. 196511281991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, November 2022

Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sucipto
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Sucipto
NIP. 197103251999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94%
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajerial dan Teknis Ditjen Kekayaan Intelektual	Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual	83 (Nilai)
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)
		Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"	81 (Nilai)
		Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA	94%
		Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	82 (Nilai)

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 402.797.069.000,-
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp. 402.797.069.000,-

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Sucipto
NIP. 197103251999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sucipto

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual

Sucipto
NIP. 197103251999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dede Mia Yusanti
Jabatan : Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Teknologi Informasi
Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Dede Mia Yusanti
NIP. 196407051992032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Manajemen Data Informasi dan Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT yang Sistematis, Efektif, Handal dan Berkelanjutan	Persentase ketersediaan layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang aman dan handal mencapai Service Level Agreement (SLA)	99,80%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 113.102.537.000,-
1.	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp. 113.102.537.000,-

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
 Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
 Direktur Teknologi Informasi
 Kekayaan Intelektual

Razilu
 NIP. 196511281991031002

Dede Mia Yusanti
 NIP. 196407051992032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dede Mia Yusanti

Jabatan : Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Direktur Teknologi Informasi
Kekayaan Intelektual

Dede Mia Yusanti
NIP. 196407051992032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIN SENGKETA
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anom Wibowo
Jabatan : Direktur Penyidikan dan Penyelesain Sengketa

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Penyidikan dan Penyelesain
Sengketa

Razilu
NIP. 196511281991031002

Anom Wibowo
NIP. 72060453

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIN SENGKETA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Persentase Penyelesaian Sengketa HKI secara Optimal	80%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 4.005.607.000,-
1.	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp. 4.005.607.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
 Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
 Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Razilu
 NIP. 196511281991031002

Anom Wibowo
 NIP. 72060453



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIN SENGKETA
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anom Wibowo

Jabatan : Direktur Penyidikan dan Penyelesain Sengketa

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Direktur Penyidikan dan Penyelesain
Sengketa

Anom Wibowo
NIP. 72060453



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
DAN RAHASIA DAGANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasmon

Jabatan : Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu dan Rahasia Dagang

Razilu
NIP. 196511281991031002

Yasmon
NIP. 196805201994031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia	1. Persentase Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi	17%
		2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 9.079.825.000, -
1.	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 9.079.825.000, -

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

Razilu
NIP. 196511281991031002

Yasmon
NIP. 196805201994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN
RAHASIA DAGANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasmon

Jabatan : Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2022

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu dan Rahasia Dagang

Yasmon
NIP. 196805201994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniaman Telaumbanua
Jabatan : Direktur Merek dan Indikasi Geografis

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Merek dan Indikasi Geografis

Razilu
NIP. 196511281991031002

Kurniaman Telaumbanua
NIP. 197501132001121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia	1. Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi	17%
		2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 6.445.914.000,-
1.	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 6.445.914.000,-

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Merek dan Indikasi Geografis

Razilu
NIP. 196511281991031002

Kurniaman Telaumbanua
NIP. 197501132001121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniaman Telaumbanua
Jabatan : Direktur Merek dan Indikasi Geografis

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Direktur Merek dan Indikasi Geografis

Kurniaman Telaumbanua
NIP. 197501132001121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Lastami
Jabatan : Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan
Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Sri Lastami
NIP. 196512311991032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis	1. Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual	17%
		2. Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI	70%
		3. Persentase Pengembangan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal	85%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 22.000.000.000,-
1.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Rp. 22.000.000.000,-

Pihak Kedua,
 Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
 NIP. 196511281991031002

Jakarta, 2 Januari 2023
 Pihak Pertama,
 Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan
 Kekayaan Intelektual

Sri Lastami
 NIP. 196512311991032002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Lastami

Jabatan : Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan
Kekayaan Intelektual

Sri Lastami
NIP. 196512311991032002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggoro Dasananto
Jabatan : Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Razilu
NIP. 196511281991031002

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	1. Persentase Penyelesaian Pencatatan Hak Cipta	100%
		2. Persentase Penyelesaian Permohonan Desain Industri	100%
		3. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Hak Cipta dan Desain Industri	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 4.541.686.000,-
1.	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 4.541.686.000,-

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Razilu
NIP. 196511281991031002

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIN SENGKETA
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggoro Dasananto
Jabatan : Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

